ARTIKULASI POLITIK MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program S-1
Prodi Politik Islam (PI)

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLA : U-2009/PI/001
K
U-2009
001
Pt
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

IDHAM HALID
NIM : E34205002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
PRODI POLITIK ISLAM
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Idham Halid ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya,.....2009
Pembimbing,

Drs. Slamet Muliono, M.Si
NIP 150. 275. 955

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Idham Halid ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, Februari 2009

Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin
Dekan,

Drs. Ma'sum Nuralim, M.Ag.
NIP. 150240835

Ketua,

Drs. Slamet Muliono, M.Si
NIP. 150275955

Sekretaris,

Dra. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 150273562

Penguji I,

DR. Biyanto, M.Ag.
NIP. 150275954

Penguji II,

Ainur Rofiq Al-Amin, SH, M.Ag.
NIP. 150368394

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Artikulasi Politik Muhammadiyah Di Era Reformasi**
Pembimbing : **Drs. Slamet Muliono, M. Si**
Penulis : **Idham Halid**

Skripsi ini adalah merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah di atas, dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data dan juga dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah pergumulan politik Muhammadiyah ditandai dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam kancah politik praktis ditunjukkan oleh tiga pola hubungan. *Pertama*, berupa keterlibatan Muhammadiyah secara formal organisasi dan langsung sebagaimana yang dilakukan dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan menjadi anggota istimewa sejak tahun 1945 hingga tahun 1959. Kegiatan politik serupa juga dilakukan ketika Muhammadiyah membidani Partai Muslimin Indonesia pada awal Orde Baru. *Kedua*, yaitu dalam bentuk keterlibatan personal dan bersifat tidak langsung yang ditandai dengan keterlibatan tokoh-tokoh atau elit Muhammadiyah dalam bentuk mendirikan partai politik atau terlibat langsung dalam kegiatan politik di partai politik atau pemerintahan seperti yang dimulai oleh Ahmad Dahlan ketika aktif dalam Syarikat Islam, Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), Parmusi, dan pada era reformasi dalam Partai Amanat Nasional (PAN), selain partai-partai politik lainnya. *Ketiga*, berupa hubungan netral dalam arti Muhammadiyah berusaha memelihara "jarak yang sama" dengan segenap kekuatan politik, tidak memilih hubungan organisatoris maupun berafiliasi dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik manapun. Pola netralitas ini berlaku sejak tahun 1971 berdasarkan Khittah Muhammadiyah hasil Muktamar di Ujung Pandang.

Berdasarkan hasil penelitian itu juga disimpulkan bahwa artikulasi politik Muhammadiyah di era reformasi dengan mengeluarkan suatu kebijakan politik Muhammadiyah menyangkut pemilihan Presiden 2004 adalah merupakan dukungan terhadap Amien Rais untuk mengagendakan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan presiden 2004, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa, umat Islam, dan persyarikatan sesuai dengan *khittah* perjuangan Muhammadiyah.

Muhammadiyah tetap menjalankan fungsinya, sebagai organisasi kemasyarakatan untuk menjadi sarana penyalur aspirasi bagi anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia, dan ikut berperan dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat pancasila berdasarkan UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....iii
MOTTO.....iv
PERSEMBAHAN.....v
ABSTRAK.....vi
DAFTAR ISI.....vii
KATA PENGANTAR.....ix

BAB I : PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian.....10
D. Kegunaan Penelitian.....10
E. Penegasan Judul.....10
F. Telaah Pustaka.....11
G. Metodologi Penelitian.....12
H. Sistematika Penulisan.....16

BAB II : PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG POLITIK.....18
A. Pemahaman Tentang Politik.....18
B. Politik Indonesia di Era Reformasi.....21
C. Hubungan Muhammadiyah Dengan Politik.....24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : SEJARAH PERGUMULAN POLITIK MUHAMMADIYAH.....41

A. Sejarah Pergumulan Politik Muhammadiyah Masa Orde Lama.....41

B. Sejarah Pergumulan Politik Muhammadiyah Masa Orde Baru.....55

C. Sejarah Pergumulan Politik Muhammadiyah Masa Era Reformasi.....60

BAB IV : ANALISIS ARTIKULASI POLITIK MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI.....65

A. Relasi Muhammadiyah Dengan Partai Politik.....65

B. Muhammadiyah Dan Pemilihan Umum 2004.....73

C. Implikasi Dari Artikulasi Politik Muhammadiyah Di Era Reformasi..... 82

BAB V : PENUTUP.....88

A. Kesimpulan.....88

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA.....90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah banyak mencatat sepak terjang perjuangan Muhammadiyah dalam politik kebangsaan. Dimana dengan berbagai dinamika, dialektika dan realitas yang begitu banyak membawa harapan dan sekaligus tantangan, membuat Muhammadiyah lebih dewasa memaknai, dan lebih arif menempatkan dirinya ditengah pergulatan politik kebangsaan yang selalu diiringi dengan kepentingan.

Sejarah pergerakan politik Muhammadiyah diawali sejak Indonesia belum merdeka tetapi lebih menonjol ketika dengan lahirnya Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) di Yogyakarta, yang diputuskan dalam kongres Muslimin Indonesia di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Muhammadiyah dalam Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) mempunyai peran yang penting dan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa (orang-orang Muhammadiyah banyak menduduki jabatan penting dalam kepengurusan Masyumi).[1]

Sepanjang perjalanan Masyumi menjadi partai politik, Muhammadiyah selalu mendampingi, tetapi setelah sidang Tanwir Masyumi pada tahun 1950 kedudukan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa sudah mulai terusik status

[1] Syaifullah, *Gerakan Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanggotaanya sebagai anggota istimewa sehingga Muhammadiyah kecewa terhadap Masyumi.[2]

Dari kekecewaan inilah Muhammadiyah memutuskan bahwa, *pertama;* Muhammadiyah tetap seperti semula sebagai gerakan Islam, sedangkan politik praktis harus diisi tetapi tidak harus mengubah Muhammadiyah sebagai gerakan politik Islam, karena dalam strategi jangka panjang hal itu tidak menguntungkan dan mempersempit ruang gerak Muhammadiyah. *Kedua*, gerak perjuangan Muhammadiyah perlu lebih dimaksimalkan dengan cara menyesuaikan dengan irama zaman.[3]

Setelah itu, Muhammadiyah kembali kepada khittah tahun 1971 yang dikenal dengan "Khittah Ujung Pandang" yang menjaga jarak dengan partai-partai atau kekuasaan. Sebagaimana lazimnya kekuasaan itu selalu dalam kesementaraan, sehingga sedikit banyak telah mempengaruhi dinamika perkembangan Muhammadiyah waktu itu. Dengan khittah 1971 tadi Muhammadiyah telah stabil, sebab tidak lagi berbenturan dengan kepentingan politik sesaat.[4]

Khittah Ujung Pandang Muhammadiyah pada tahun 1971 berbunyi:[5]

> 'Bismillahirrahmanirrahim Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang berlangsung dari tanggal 1 s.d. 6 Sya'ban 1391 bertepatan dengan 21 s.d. 26 September 1971 di Ujung Pandang, setelah mendengar pandangan dan

---

[2] *Ibid*, 149

[3] *Ibid*, 150.

[4] Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Relegia, 2005), 188

[5] Hamdan Hambali, *Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat para peserta Muktamar tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lainnya dalam usaha peningkatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam, memutuskan sebagai berikut:1. Muhammadiyah adalah gerakan Da'wah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai atau organisasi apa pun.2. Setiap anggota Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah.3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebgai gerakan Da'wah Islam setelah Pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual'

Memasuki Orde baru, Muhammadiyah tidak lagi bersinggungan dengan politik praktis. Kehadiran Muhammadiyah justru terasa lebih nyata sebagai gerakan sosial keagamaan yang berprinsip pada *amar ma'ru nahy munkar.* Bahkan, kinerja Muhammadiyah mampu menarik hati penguasa orde baru karena banyak agenda riil yang telah banyak dilaksanakan oleh persyarikatan yang usianya jauh lebih tua di banding republik ini.[6]

Jadi setelah keluarnya khittah Ponorogo dan khittah Makassar hingga tahun 1998, Muhammadiyah benar-benar menjaga jarak dengan partai politik,

---

[6] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena konteks zamannya yang tidak memungkinkan bagi Muhammadiyah untuk berpolitik praktis. [7]

Namun ketika robohnya tembok kekuasaan rezim orde baru menyebabkan berkembangnya kehidupan multipartai. Bisa dikatakan hampir semua kelompok politik yang semasa orde baru dimatisurikan, bangkit kembali membentuk partai politik baru maupun lama. Kelahiran kembali partai-partai baru dan bangkitnya kembali partai-partai lama merupakan cerminan dari keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk (*plural society*)[8]

Gerakan politik yang diperankan oleh Muhammadiyah adalah gerakan aklamasi diri sebagai bentuk perjuangan lewat jalur politik praktis. Artinya kecenderungan untuk masuk kepada sistem pemerintahan dan melakukan kritik dari dalam dengan menduduki pos-pos penting pemerintahan. Kecenderungan Muhammadiyah untuk berpolitik praktis ditengarai pada era kepemimpinan Amien Rais. Walaupun pada awalnya Muhammadiyah juga secara tidak langsung dapat melepaskan diri dari persoalan politik.[9]

Jika dilihat konteks corak politik Muhammadiyah, ada tiga corak pemikiran. *Pertama*, Muhammadiyah kembali ke masa awal berdirinya tahun 1912 yaitu sebagai gerakan Islam yang non-politik. Urusan politik diserahkan kepada kebebasan pribadi anggota atau warga Muhammadiyah. *Kedua*, corak

---

[7] Mitsuo Nakamura,et al. *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2005), 249

[8] A. M. Fatwa, *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa*, (Jakarta: INTRANS, 2003), 50

[9] Deni Al Asy'ari dkk, *Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah* (Yogyakarta; Resist Book, 2005), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modernisme (Liberal) yaitu, pemikiran politik yang menginginkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang non-politik tetapi tidak anti politik. Yang *ketiga*, Sekularisasi yakni pemikiran politik yang menginginkan berubahnya identitas Muhammadiyah, dari gerakan Islam menjadi partai politik.[10]

Ketika awal Reformasi 1998 Muhammadiyah kembali terseret ke dalam politik. Bahkan orang Muhammadiyah memberikan dukungan yang luar biasa kepada Amien Rais dan partai politik yang didirikannya.[11] Ambiguitas Muhammadiyah menghadapi realitas kebangsaan pada satu sisi, menuntut Muhammadiyah terlibat aktif dalam pencaturan politik nasional. Disisi lain mempertahankan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan mulai nampak. Untuk memperjelas sikap politik Muhammadiyah, maka sidang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan tanggal 5 Juli 1998 yang mana keputusannya mengikhlaskan Amien Rais terjun dalam Politik praktis tidak itu saja, pemuda Muhammadiyah juga mengikhlaskan kalau bangsa Indonesia menghendaki Amien Rais memegang jabatan di pemerintahan.[12]

Dengan rekomendasi itulah kemudian Amien Rais mempunyai keinginan untuk mengkondisikan warga Muhammadiyah menerima kehadiran partai politik baru dalam menghadapi pemilu 1999, yang pada masa Reformasi tersebut, telah diberlakukan multi partai.

---

[10] Muhammad Azhar, *Posmodernisme Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 30-31

[11] Hajriyanto Y. Thohari, *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*, (Jakarta; Pusat Study Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005), x-xi

[12] Sudarsono Shabron, *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*, (Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press,2003), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak bisa dipungkiri bahwa wajah dan penampilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pemimpinnya walaupun bentuk kepemimpinan itu bersifat kolektif sebagaimana Muhammadiyah. Sejak M. Amien Rais, yang juga seorang ahli politik Timur Tengah itu, masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, warna politiknya mulai kelihatan. Lebih-lebih setelah melemparkan wacana suksesi kepemimpinan nasional dalam sidang Tanwir di Malang tahun 1993. kemudian dilanjutkan keterlibatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil muktamar ke-43 di Banda Aceh tersebut dalam membawa gerbong reformasi menuju lengsernya Soeharto.[13]

Dalam sidang tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik. Oleh kalangan Muhammadiyah diterjemahkan dengan mendirikan partai politik. Dengan demikian Amien Rais selaku kader yang menonjol mendirikan Partai Amanat Nasional pada tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta. Akhirnya kepemimpinan Amien Rais meninggalkan persoalan apakah Muhammadiyah sebagai gerakan politik atau tetap menjadi gerakan *amar ma;ruf nahi munkar.*[14]

Bahkan ketika Tanwir Muhammadiyah 2002 di Bali dan 2004 di Makassar, meski tanpa menyebut nama, Muhammadiyah sudah berani mengajukan "kader terbaiknya" sebagai calon presiden RI. Dan dilanjutkan

---

[13] Ibid, 149
[14] A. M. Fatwa, *PAN Mengangkat Harkat*.....,90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sidang pleno 10 Februari 2004 yang mendorong kader terbaiknya ("dengan Menyebut nama Amien Rais") menjadi presiden RI 2004-2009.[15]

Dalam sidang Tanwir Muhammadiyah 2002 di Bali dijelaskan Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan *"Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur"*.[16]

Akan tetapi, sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memberikan dukungan secara resmi kepada Amien Rais untuk menjadi presiden dalam pemilu 2004 ternyata juga mendapat protes keras. Sikap protes tersebut dikemukakan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari, yang mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang terlalu pagi dan agak prematur. Dalam pandangan Hajriyanto Y. Thohari, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepertinya tidak melihat dampak jangka panjangnya terhadap eksistensi ormas

---

[15] Mitsuo Nakamura,et al. *Muhammadiyah Menjemput*.....,249

[16] Hamdan Hambali, *Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam ini. Ia khawatir, keputusan itu akan menggeser Muhammadiyah dari gerakan dakwah ke politik praktis.[17]

Walaupun Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi organisasi ini dalam perjalanannya senantiasa mewarnai dinamika politik di Indonesia yang memerankan aksi-aksi politiknya dengan terlibat dalam politik praktis ini terlihat ketika keterlibatan secara formal dan langsung ketika Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) sebagai penasehat dan anggota Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PSI) dan Budi Utomo, begitu juga dengan Mas Mansur yang dikenal sebagai pelopor berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), tokoh lainnya Djarnawi Hadikusumo yang sempat memimpin Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan lebih kentara lagi ketika Muhammadiyah terlibat langsung dalam Masyumi.[18]

Di era orde baru Muhammadiyah tidak lagi bersentuhan dengan politik praktis, hal ini ditegaskan ketika Muhammadiyah mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas. Kebijakan netralitas itu diambil pada Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang.[19]

Dalam skripsi ini khususnya di era Reformasi menjelaskan mengenai dukungan Muhammadiyah terhadap Amien Rais selaku kader terbaik serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa

---

[17] Sudar Siandes, *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 14

[18] Ibid, 4

[19] Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2006), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemilihan presiden 2004.[20] terlebih lagi setelah lahirnya keputusan Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kebijakan Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2004, maka nuansa politik dalam tubuh Muhammadiyah dirasakan semakin besar dan kuat. Sehingga sebagian orang yang menilai bahwa dalam gerakan Muhammadiyah saat ini sedang terjadi pergeseran yang sangat fundamental dari gerakan dakwah yang mengembangkan model berpikir yang berbasis nalar kritik menjadi gerakan mobilisasi politik,[21] sehingga menjadi layak dan menarik untuk di teliti.

Oleh karena itu, perdebatan mengenai artikulasi politik Muhammadiyah di era Reformasi, apakah masuk dalam politik praktis ataukah hanya sebagai organisasi keagamaan yang berprinsip pada *amar ma'ruf nahi munkar*, maka berdasarkan perdebatan itulah muncul ide penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang artikulasi politik Muhammadiyah khususnya di era Reformasi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah pergumulan politik Muhammadiyah ?
2. Bagaimana artikulasi politik Muhammadiyah di era Reformasi ?

---

[20] Sudar Siandes, *Muhammadiyah Eksperimen Politik*……., vi
[21] Ibid, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami sejarah pergumulan politik Muhammadiyah
2. Memahami artikulasi politik Muhammadiyah di era Reformasi

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana politik.

Sedangkan dalam segi praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memahami dengan jelas tentang wacana Artikulasi politik Muhammadiyah khususnya di era Reformasi.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiyah ini dan untuk memperjelas interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul artikulasi politik Muhammadiyah di era reformasi, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dam konteks kebahasan.

Artikulasi Politik	: Memahami gerakan politik Muhammadiyah.
Era Reformasi	: Dalam pembahasan skripsi ini untuk memperjelas renggang waktu di reformasi, maka era reformasi dimulai dari sepuluh tahun reformasi yakni dari tahun 1998-2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Telaah Pustaka

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah:

1. *Dinamika Politik Muhammadiyah,* karya Haedar Nashir, UMM Press, Malang, 2006. Yang membahas hubungan Muhammadiyah dengan politik. Muhammadiyah tetap tegar meneguhkan diri sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah yang tidak berpolitik praktis, tetapi sepanjang sejarahnya sering dihadapkan pada dinamika pergulatan politik nasional yang penuh warna-warni.
2. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi,* karya Syaifullah, Pustaka Utama Grafiti, 1997. membahas mengenai gerakan dan hubungan politik Muhammadiyah dengan Masyumi.
3. *Meruwat Muhammadiyah; Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia,* karya Mu'arif, Pilar Religia, 2005, buku ini membahas mengenai perdebatan kembali keberadaan Muhammadiyah sebagai Ormas yang mengklim diri sebagai penggerak pembaharuan Islam di Indonesia melalui gerakan *tajdid* sekaligus *tanzil*-nya.
4. *Muhammadiyah The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism,* karya Alfian, Gadjah Mada University Press,1989, buku ini membahas bahwa Muhammadiyah sebagai suatu gerakan pembaharu orang Islam yang mampu menembus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam masyarakat Islam Indonesia dan muncul sebagai salah satu unsur yang penting dalam proses sosial-politik yang berubah di Indonesia dan Muhammadiyah mempunyai dampak yang penting dalam politik Indonesia.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis diatas, belum ada penelitian yang mendalam dengan memfokuskan pada artikulasi politik Muhammadiyah khususnya diera Reformasi tersebut dalam objek kajian sebagaimana yang penulis teliti. Adapun titik fokus yang akan penulis teliti adalah artikulasi politik Muhammadiyah di era Reformasi.

Skripsi ini merupakan kelanjutan dan pelengkap bagi beberapa penelitian yang sudah dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan motode penelitian kualitatif. hal mana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Dari sisi *metodelogis*, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.[22]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik[23] yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa bahasa Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini maupun dengan yang lainnya.

3. Sumber Data

Kajian ini bersifat kepustakaan karena itu data yang akan dihimpun merupakan data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek study ini.

Adapun sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer, yang dipakai yaitu: buku-buku atau yang membahas atau terkait dengan: "Artikulasi politik Muhammadiyah di era Reformasi", diantaranya:

---

[22] Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), 94

[23] Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin,* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Hamdan Hambali, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006
2. *Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah*, Deni Al Asy'ari, dkk, Yogyakarta: Resist Book, 2005.
3. *Muhammadiyah Dan Pergulakan Politik Islam Modernis,* Hajriyanto Y. Thohari, Jakarta: Pusat Study Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005.
4. *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah,* Asep Purnama Bahtiar, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2004.
5. *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004,* Sudar Siandes, Jakarta Rineka Cipta, 2004.
6. *Muhammadiyah Dalam Gonjang Ganjing Politik,* Andi Wahyudi, Yogyakarta, Media Pressindo, 1999.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku penunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:

1. *Kamus Bahasa Indonesia*, karya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, Surabaya, Arkola.
2. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, karya Miriam Budiardjo, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Negara Muhammadiyah,* Karya Syarifuddin Jurdi, Kreasi Wacana, 2005.
4. *Posmodernisme Muhammadiyah,* Karya Muhammad Azhar, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
5. *Muhammadiyah Dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*, Sudarsono Shabron, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003
6. *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa,* A. M. Fatwa, Jakarta: INTRANS, 2003.

Data yang sudah terkumpul, kemudian diseleksi untuk menentukan apakah data tersebut relevan atau tidak dengan fokus penelitian yang ditulis. Sehingga hanya data yang dianggap relevan saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, digunakan dokumentasi dimana dalam pelaksanaannya, metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, catatan tertulis lainnya.

Selanjutnya, data yang diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dengan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis Data

Berpijak pada hasil data dari buku-buku yang mendukung, maka analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam.[24] Atau menurut Soedjono dan Abdurrahman, analisis isi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.[25] Analisis isi dimaksudkan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat pandangan Muhammadiyah tentang politik. Isinya mengenai pemahaman tentang politik dan hubungan Muhammadiyah dengan politik

---

[24] Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Jilid 2, terj. Arief Sukadi Sadiman, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991), 48

[25] Soedjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga memuat sejarah politik Muhammadiyah yang di dalamnya memuat sejarah politik masa Orde Lama, Orde Baru dan sejarah politik era Reformasi

Bab keempat berisi analisa data, yaitu analisis mengenai artikulasi politik Muhammadiyah khususnya di era Reformasi.

Bab kelima berisi penutup yaitu, kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG POLITIK

A. Pemahaman Tentang Politik

Mengkaji hubungan Muhammadiyah dan politik haruslah diawali dengan penjelasan tentang pengertian politik untuk mengetahui secara tepat apa yang dimaksud dengan politik oleh Muhammadiyah yang menjadi acuan bagi organisasi Islam ini dalam menentukan sikap dan langkah-langkah mengenai politik.

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata *polis* yang berarti Negara kota. Negara kota yang dimaksud pada waktu itu adanya hubungan antara warga Negara dengan Negara lainnya dalam hal pengaturan untuk kebaikan bersama.[1] Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan. Lebih lanjut kita lihat pendefinisian politik sebagai berikut:

George Catlin, politik adalah sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (*the act of human social control*).[2]

Sedangkan Miriam Budiardjo, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik *(politics)* adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik

---

[1] Budi Suryadi, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), [illegible]
[2] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1997), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.[3]

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku politik, baik berupa aktivitas atau sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan, dan politik merupakan bentuk asosiasi manusia dalam rangka mencapai kebaikan bersama (*public good*) menjadi bagian terpenting dalam kehidupan.

Jadi politik itu adalah segala cara dimana kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi hal-hal pokok dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ranah politik bukan saja menyangkut berbagai kegiatan seputar pemerintahan belaka, tetapi juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok dan individu. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan cara-cara dimana rakyat yang berada diluar pemerintahan berusaha mempengaruhi proses politik dalam pemerintahan.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals).* Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, orang seorang (individu), ormas seperti halnya juga Muhammadiyah, politik juga mencakup berbagai aktivitas yang berkenaan dengan Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan

---

[3] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*policy beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) nilai-nilai dalam masyarakat.[4]

Politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara tetapi bagaimanapun ia didefinisikan, satu hal yang sudah pasti, bahwa politik menyangkut kekuasaan dan penggunaan kekuasaan. Disamping itu, dalam pengertian sehari-hari, politik juga berhubungan dengan cara dan proses pemerintahan suatu Negara. Oleh karena itu, politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya.[5]

Dari pengertian mengenai politik sebagaimana telah dipaparkan itu maka betapa luas cakupan bidang kehidupan dan kegiatan politik. Politik bukan semata-mata berkenaan dengan kegiatan dari partai politik dan menyangkut perjuangan kekuasaan dalam pemerintahan. Politik juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas seperti dalam kelompok-kelompok sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga dan golongan-golongan sosial di masyarakat.

---

[4] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: anggota IKAPI, 2007), 8-9

[5] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita*……,, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Politik Indonesia di Era Reformasi

Era reformasi merupakan suatu masa perubahan dan pembaharuan melalui upaya koreksi dan perbaikan-perbaikan terhadap aspek-aspek yang ada dalam suatu negara (politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan hankam) yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kontekstual untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan demikian esensi pokok segala dari pada referensi adalah perubahan dan menolak terhadap perasaan dan pikiran mereka dalam kehidupan politik.[6]

Tuntutan reformasi yang digulirkan diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik dari pada era sebelumnya, hal ini di karenakan seiring dengan perkembangan zaman dengan segala sesuatu yang telah mengalami kemajuan sebagai era modernisasi sehingga diharapkan tercapainya suatu kehidupan yang lebih demokratis.

Berbekal dari kegagalan praktek demokrasi pada pemerintahan sebelumnya, di era reformasi praktek demokrasi di Indonesia banyak mengalami perubahan. Salah satu hal yang menjadi fenomena dalam demokrasi Indonesia pada masa transisi reformasi adalah bergesernya sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) kesistem demokrasi langsung (*direct democracy*). Meskipun hal ini baru berjalan sejak pemilihan umum 2004. setidaknya fenomena perubahan ini semakin memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat banyak dalam berbagai proses pemilihan.

---

[6] Arbit Sanit, *Reformasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), vii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik Indonesia Memasuki iklim politik di era Reformasi yang ditandai oleh penggantian Presiden Republik Indonesia sebanyak tiga kali (Habibie, Abdurrahwan Wahid, Megawati Soekarnoputri), fungsi dan peran TNI/Polri di era Orde Baru kian menemukan muaranya guna memasuki era demokrasi.[7]

Pertama, yang sangat terasa dalam kehidupan berpolitik adalah terbukanya peluang supremasi sipil. Demokrasi yang berkembang dalam kehidupan politik saat ini lebih merupakan pertarungan antara sekelompok masyarakat melalui LSM, eksekutif dan legislatif yang merupakan pencerminan sekelompok masyarakat melalui partai.

Pola penegakan sistem politik otoritarianisme yang melumpuhkan daya saing dan daya tahan ekonomi yang hidup di era Orde Baru, kini dijalankan oleh pemerintahan sipil. Tidak lagi didukung oleh TNI dan Polri. Akibatnya bukan iklim demokrasi yang kita rasakan, tetapi iklim anarkisme yang terjadi.

Di balik kegagalan itu, pengucilan politik, manipulasi kekuasaan, pembunuhan politik, korupsi politik adalah sejumlah bentuk tindakan politik yang mewarnai kehidupan bangsa. Tidak ada kekuatan yang mampu mengoreksi aksi politik tak beretika itu secara jelas dan lugas. Peran dang fungsi LSM juga terkadang mengalami distorsi, sehingga sulit membedakan kepentingan yang ada di belakangnya.

---

[7] Yusuf Yazid, *Di Antara Sipil Dan Militer,* (Pusat Kajian Sipil Dan Militer 02 Juni 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilihan kita untuk menerapkan sistem politik yang demokratis merupakan pilihan yang bukan tanpa alasan yang mendasar. Demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya. Di sinilah letak keunikan demokrasi itu. Dan antara lain karena alasan inilah, di era reformasi ini, kita memilih untuk menerapkan sistem politik yang demokratis pasca-Orde Baru. Dengan menerapkan sistem politik yang demokratis, diharapkan bangsa Indonesia tidak hanya akan mampu memulihkan kondisi multikrisis yang dihadapinya, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945.[8]

Dalam konteks Indonesia, sudah menjadi guratan sejarah bahwa sejak 1998, jalan reformasi telah dipilih. Indonesia memasuki babak baru, tatkala reformasi telah membukakan jalan bagi terselengaranya proses dan praktek demokratisasi. Penampakan yang nyata atas praktek dan proses demokratisasi adalah hadirnya partai-partai politik dalam jumlah banyak menyusul dibukannya keran reformasi politik. Dalam perkembangannya, dari ratusan jumlah partai politik yang ada, kemudian tersaring 48 partai politik yang ikut pemilu pada 1999 dan 24 pada 2004. Dan, agaknya jumlah partai politik belum menunjukkan tanda-tanda penurunan menjelang Pemilu 2009.

---

[8] Akbar Tandjung, *Perspektif Masa Depan Indonesia,* 30 Januari 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hubungan Muhammadiyah Dengan Politik

Di kalangan Muhammadiyah sebagaimana kesan umum yang dapat ditangkap dalam masyarakat, istilah politik lebih banyak merujuk pada pengertian politik secara khusus. Politik difahami dalam kaitan dengan partai politik, yang disebut pula secara populer dengan istilah ”politik praktis”, sedangkan "politik non praktis" adalah politik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, yang lebih menekankan pada usaha mempengaruhi proses politik tanpa berambisi untuk merebut posisi-posisi politik dalam struktur pemerintahan. Karena itu, ketika memperbincangkan tentang hubungan Muhammadiyah dalam kegiatan-kegiatan politik yang disebutnya sebagai berpolitik- praktis sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian politik secara spesifik. Kegiatan politik jenis ini dalam ilmu politik sering disebut kegiatan politik yang bersifat *real politics* yang membedakan dari kegiatan politik yang bersifat *moral force* sebagaimana sering dimainkan oleh kelompok kepentingan (*interest groups*)[9].

Pandangan Muhammadiyah tentang politik, memang tidak secara jelas dan rinci dapat ditemukan dalam banyak sumber dokumen. Namun demikian dari berbagai dokumen yang ada dan peran aktivis dalam kegiatan politik dan kenegaraan, bahan-bahan untuk kepentingan itu bisa dicari dan bisa dijadikan rumusan tentang pandangan Muhammadiyah dalam bidang politik. Dalam hubungan itu, sebagaimana yang disimpulkan oleh Taufiq Abdullah bahwa

[9] Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press; 2006), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan Muhammadiyah meletakkan politik sebagai produk dari dinamika sosial kemasyarakatan dan kebudayaan dalam apa yang dikenal sebagai "gerakan dakwah". Bagi Muhammadiyah, politik (partai atau negara) adalah sub-sistem dari gerakan dakwah.[10]

Kemudian Amien Rais memberikan pernyataan Muhammadiyah dalam berpolitik, bahwa dengan apa yang dikatakanya mengenai *high politics* yang merupakan bagian dari gerakan dakwah yang sesuai dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.[11]

Muhammadiyah dengan kehidupan politik berkaitan dengan konsep Muhammadiyah tentang dakwah dan kehidupan sosial. Pandangan demikian dapat dilihat dalam rumusan Kepribadian Muhammadiyah yang disusun pada tahun 1961/1962. Konsepsi Muhammadiyah dalam kepribadian Muhammadiyah merupakan rekonstruksi dinamika Muhammadiyah dalam sejarah. Rumusan tersebut menyatakan bahwa politik dalam pengertiannya yang luas merupakan sub-sistem gerakan dakwah sebagai sistem pengembangan hidup sosial.[12]

Hubungan antara politik dan dakwah sering tidak dimengerti dengan baik oleh sementara kaum Muslimin, sehingga banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, bahkan dalam masyarakat, ada kesan

---

[10] Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), 114-115

[11] Amien Rais, *High Politics, Intelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era baru*, (Bandung: Mizan, 1995), 74

[12] Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang posistif terhadap kegiatan politik, seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, dan berbagai konotasi buruk lainnya. Persepsi seperti ini tentu cukup berbahaya, ditinjau dari kecamata dakwah, pandangan ini juga sangat merugikan.[13]

Kegiatan dakwah dalam Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, karena *amar ma'ruf nahi munkar* juga meliputi segala bidang kehidupan. Hubungan Muhammadiyah dengan kehidupan politik berkaitan dengan konsep Muhammadiyah tentang dakwah dan kehidupan sosial, ini dapat dilihat dalam rumusan Kepribadian Muhammadiyah yang disusun pada 1961/1962. konsepsi Muhammadiyah dalam Kepribadian Muhammadiyah di atas merupakan rekonstruksi dinamika Muhammadiyah dalam sejarah. Rumusan tersebut menyatakan bahwa politik dalam pengertiannya yang luas merupakan sub-sistem gerakan dakwah sebagai sistem pengembangan hidup sosial.[14]

Rumusan mengenai masalah dakwah dan politik dalam struktur pemikiran Muhammadiyah dapat dimasukkan sebagai bagian dari konsepsi Muhammadiyah tentang teori dan dan strategi perjuangannya. Sesuai dengan kedudukan pemikiran tersebut, maka pemikiran itu bersifat kondisional. Dengan demikian maka ia dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi kehidupan sosial.

---

[13] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*……, 23
[14] Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan*……,77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan demikian menyebabkan perilaku politik Muhammadiyah tampak di permukaan seperti berubah-ubah. Namun demikian jika di telusuri secara mendalam perubahan tersebut tetap berada dalam satu alur konsep yang tetap sebagai upaya pengembangan tata kehidupan sosial diatas prinsip ajaran Islam.

Gerak perjuangan Muhammadiyah dijelaskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Sementara secara operasional, bahwa Muhammadiyah memilih lahan dakwah di bidang kemasyarakatan ditegaskan dalam *khittah* (garis) perjuangan diantaranya; Khittah Ponorogo 1969, Khittah Surabaya 1978, Khittah Denpasar 2002. Berikut ini adalah kutipan panjang tentang Khittah Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara:[15]

> *'Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.*
>
> *Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk*

[15] Hajriyanto Y. Thohari, *Muhammadiyah dan Pergulakan Politik Islam Modernis*, (Jakarta: Pusat Study Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), xiv-xv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Dalam keputusan Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditegaskan bahwa Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan tidak kalah penting dan strategis daripada perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat.

Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Sejak berdirinya pada 18 November 1912 hingga sekarang, memang sulit untuk dipungkiri kalau keberadaan Muhammadiyah dianggap tidak memiliki daya pengaruh dalam percaturan politik. Hal ini karena sering diwarnai oleh model dan tipe kepemimpinan serta cita rasa politik pimpinannya, yang satu dengan yang lainnya mempunyai ciri khas dan gayanya sendiri-sendiri, sehingga Istilah Muhammadiyah sebagai gerakan yang banyak wajah juga dapat dipahami dalam konteks gerakan Muhammadiyah diluar aspek keagamaan secara khusus yang meliputi banyak bidang kehidupan seperti aspek sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Bidang lain yang tidak luput dari perhatian dan kepedulian gerakan Muhammadiyah adalah masalah politik. Kendati secara formal organisatoris bukan organisasi atau partai politik, namun eksistensi dan artikulasi gerakan Muhammadiyah, diakui atau tidak, mempunyai peran dan pengaruh politik yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[16]

Dalam pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 23 Oktober 2004 lalu, persoalan hubungan antara Muhammadiyah dan politik, serta posisi Muhammadiyah dalam politik, menjadi salah satu topik

---

[16] Asep Purnama Bahtiar, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalmalan Islam (LPPI) UMY, 2004), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang banyak menarik perhatian sehingga menimbulkan arus pemikiran besar dalam Muhammadiyah mengenai persoalan politik. Arus pertama tetap menghendaki Muhammadiyah menghindari keterlibatan dalam politik dalam pengertian operasional, dan agar Muhammadiyah juga membangun dan melembagakan semacam "sayap politik" (partai politik) yang berfungsi sebagai wahana bagi artikulasi kepentingan politik warga Muhammadiyah.[17]

Bagi para pendukung arus pertama, Muhammadiyah diharapkan tetap memainkan peran politiknya dalam tataran normatif, dengan fokus aktivitas pada penguatan pengaruh politik Muhammadiyah melalui artikulasi pendapat dan Muhammadiyah harus menjalankan *high politics*.

Bagi para pendukung arus kedua, strategi difersifikasi akses dan wahana yang dianjurkan oleh arus pertama dilihat tidak memadai lagi dalam menampung kepentingan politik Muhammadiyah. Ada empat alasan yang diajukan *Pertama*, tidak ada jaminan kader-kader Muhammadiyah yang tersebar di berbagai partai politik akan senantiasa menjadikan kepentingan Muhammadiyah sebagai referensi utama dalam berpolitik, *Kedua*, strategi diversifikasi akses politik selalu membuat Muhammadiyah kesulitan menyalurkan aspirasinya, terutama dalam menanggapi hal-hal krusial yang mengemuka dalam proses politik. *Ketiga*, Muhammadiyah akan terus menerus menjadi alat legitimasi bagi mereka, baik warga maupun bukan, yang

---

[17] Rizal Sukma, *Muhammadiyah dan politik, Refleksi Untuk 79 Tahun Syafii Maarif.* Dalam buku *Muhammadiyah Dan Politik Islam Inklusif*, (Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2005), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan untuk masuk dalam kekuasaan politik menjelang pemilu. *Keempat*, meskipun dukungan Muhammadiyah selalu dicari, para aktivis Muhammadiyah kerapkali terpinggirkan dalam proses distribusi kekuasaan itu sendiri.[18]

Bagi pendukung arus pertama, Muhammadiyah diharapkan tetap memainkan peran politiknya dalam tataran normatif, dengan fokus aktivitas pada penguatan pengaruh politik Muhammadiyah melalui artikulasi pendapat, pemikiran, dan pandangan Muhammadiyah mengenai berbagai hal yang menyangkut umat Islam. Arus pertama ini tetap melihat bahwa Muhammadiyah harus menjalankan "*high politics*", "politik moral" ataupun "politik alokatif" seperti yang di paparkan oleh Amien Rais bahwa ranah yang disebut politik praktis disebut *low politics* yakni politik yang terlalu praktis dan sering kali cenderung nista, sedangkan yang berupa *high politics* yakni politik adihulung (luhur) dan berdimensi moral serta etis.[19]

Konsep M. Amien Rais, tentang kedua jenis politik tersebut mempunyai implimentasi berbeda, kalau *high politics* akan lebih mengedepankan politik yang berkualitas tinggi, sedangkan *low politics* ialah politik yang berkualitas rendah, artinya, *high politics* itu merupakan politik yang luhur, adi luhung dan berdimensi moral serta etis sehingga kualitasnya

---

[18] Ibid, 4

[19] Amien Rais, *High "Politics"*, dalam Koentowijoyo, *Intelektualisme Muhammadiyan Menyongsong Era Baru* (Bandung: Mizan, 1995), lihat Sulastomo, "Muhammadiyah dan Politik", 71-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi. Sedangkan *low politics,* berarti politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista sehingga akhirnya disebut politik yang berkualitas rendah.

Menurut Mun'im A. Sirry politik alokatif yang diformulasikan secara sangat cerdas oleh M. Amien Rais dengan slogan *high politics* bahwa politik alokatif adalah upaya memajukan aspirasi suatu kelompok kepentingan secara eksklusif melalui kanal-kanal yang memungkinkan.[20] Ini terlihat ketika Muhammadiyah berhasil memainkan peran signifikan dalam mengartikulasikan kepentingan komunitas muslim. Misalnya, keterlibatan Muhammadiyah dalam proses perumusan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (1988) yang antara lain mengizinkan siswi muslimah pakai jilbab dan Peradilan Agama (1989).

Sebagai contoh terhadap peristilahan tersebut adalah bahwa bila seseorang individu atau kelompok menunjukkan sikap yang tegas terhadap penegakan proses demokrasi, memerangi ketidakadilan walaupun pahit untuk di ucapkan, menghimbau pemerintah terus memperjuangkan kebenaran dan keterbukaan yang semua itu bermuatan etika, maka pada hakikatnya mereka sedang melaksanakan *high politics.*

Demikian sebaliknya, jika seorang individu atau kelompok melakukan manuver (latihan) politik untuk memperebutkan suatu jabatan dalam suatu

---

[20] Mun'im A. Sirry, *Dakwah Politik Muhammadiyah*, dalam buku: Sudar Siander, *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga eksekutif, membuat kelompok penekan (arus bawah), berbuat kasak-kusuk untuk mempertahankan, maka pada dasarnya melaksanakan politik rendah atau *low politics*.

Mengkaji hubungan Muhammadiyah dan politik tidaklah mudah karena seringkali dihadapkan kepada paradoks yang relatif rumit. Kerumitan pertama ketika diajukan pertanyaan, bagaimana dapat dijelaskan bahwa Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan sosial keagamaan yang bersifat nonpolitik justru terlibat dalam pergumulan politik?

Muhammadiyah secara kelembagaan tampaknya menyadari adanya paradoks atau kemuskhilan yang harus dihadapi ketika bersentuhan dengan dunia politik. Fenomena ini dapat kita baca dalam penjelasan keperibadian Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah, 1996: 6)[21] sebagai berikut:

> "Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik mendesak-desak urusan agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri".

Dari konsep kepribadian Muhammadiyah yang merupakan gambaran situasi yang dihadapi organisasi ini dapat dibaca bagaimana rumitnya hubungan Muhammadiyah dengan politik. Di satu pihak Muhammadiyah bukan merupakan organisasi politik yang berusaha dihindarinya. Bagi Muhammadiyah keterlibatan dalam dunia politik itu difahami dengan

---

[21] Haedar Nashir, *Dinamika Politik*……, 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian bahwa politik merupakan kegiatan perjuangan meraih kekuasaan yang secara langsung dimainkan oleh perjuangan partai politik. Tetapi kalau dilihat kerangka berpikir sebagaimana penjelasan kepribadian, agaknya Muhammadiyah akan mengambil ruang untuk memainkan fungsi politik sebagaimana fungsi kelompok kepentingan (*interest group*), ketika menyatakan "akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri".

Muhammadiyah, sekali lagi, tampaknya lebih menempatkan konsep politik dalam pengertian *real politics*, yang disebutnya sebagai kegiatan politik praktis. Dalam buku Haedar Nashir dijelaskan secara sederhana terdapat tiga pola hubungan Muhammadiyah dan politik yakni hubungan yang bersifat formal dan langsung, hubungan yang bersifat personal dan tidak langsung, dan hubungan netral murni. Kategorisasi ini terutama diperoyeksikan dalam pengertian politik sebagai perjuangan kekuasaan melalui partai politik tanpa mengesampingkan konsep politik dalam perspektif yang umum.[22]

a. Hubungan Formal Dan Langsung

Hubungan Muhammadiyah dan politik yang bersifat formal artinya Muhammadiyah secara organisasi terlibat langsung dalam partai politik. Adapun hubungan yang bersifat langsung artinya

[22] Ibid, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah terlibat secara aktif dan konkret dalam melakukakan aktivitas-aktivitas politik yang berorentasi pada perjuangan kekuasaan yang sering disebut perjuangan politik praktis (*real politics*). Hubungan Muhammadiyah yang bercorak formal dan langsung secara menyolok terjadi ketika terlibat dalam pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta dan bahkan menjadi salah satu pilar utama dan anggota istimewa dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).[23]

Keberadaan Muhammadiyah dalam Masyumi merupakan bentuk hubungan formal dan konkret dari keterkaitan Muhammadiyah secara kelembagaan dalam dunia politik, yang sering disebut dengan kegiatan politik praktis. Kegiatan politik praktis yang dimaksud adalah aktivitas Muhammadiyah secara langsung untuk memperebutkan posisi-posisi politik dalam pemerintahan sebagaimana yang lazim dilakukan oleh partai politik. Oleh karena keterlibatan yang bersifat formal, langsung, dan praktis itu maka Muhammadiyah pada era Masyumi banyak mengalami gesekan dan pertentangan dengan kelompok lain secara politik berbeda dan terpaksa harus berebut kepentingan.

---

[23] Ibid, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hubungan Yang Bersifat Personal Dan Tidak Langsung

Hubungan Muhammadiyah dengan politik yang bersifat personal dan tidak langsung ditandai oleh keterlibatan aktif tokoh-tokoh puncak Muhammadiyah yang memperoleh dukungan luas dari anggota Muhammadiyah dalam membidani kelahiran dan mendukung keberadaan partai politik tertentu. Pola hubungan ini dikatakan bersifat tidak langsung karena tidak memiliki kaitan formal organisatoris langsung dengan Muhammadiyah.[24]

Hubungan ini bisa dilihat ketika keterlibatan Ahmad Dahlan, Fakhruddin, Agus Salim dalam partai politik Syarikat Islam pada era H. O. S. Cokroaminoto, Ahmad Dahlan juga aktif dalam Boedi Oetomo dan sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional lain yang radikal.

c. Hubungan Netral Murni.

Hubungan Muhammadiyah dengan politik menjadi lebih tegas ketika organisasi Islam ini mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas.[25]

---

[24] Ibid, 42
[25] Ibid, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi (penerapan) dari hubungan pertama dan ketiga bahwa, Muhammadiyah setidak-tidaknya memelihara netralitas dari partai politik manapun tanpa harus antipati terhadap perkembangan politik nasional yang sangat menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Dimasa depan tentu sikap netral Muhammadiyah itu memerlukan formulasi baru agar tidak terjebak kembali pada sikap alergi dan anti politik, yang tentu saja tidak sehat bagi Muhammadiyah sendiri maupun bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Dengan tetap menjadi organisasi sosial keagamaan yang non-politik, Muhammadiyah sebenarnya dapat memainkan peran atau fungsi sebagai kelompok kepentingan yang aktif dan efektif lebih sekedar menjaga diri dalam netralitas politik.

Kebijakan netralitas itu diambil pada Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang yang kemudian dikenal dengan konsep Khittah Perjuangan Muhammadiyah, yang berbunyi sebagai berikut:[26]

1. Muhammadiyah adalah gerakan Da'wah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai atau organisasi apa pun
2. Setiap anggota Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah.

---

[26] Hamdan Hambali, *Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 1971 itulah Muhammadiyah secara perlahan tapi pasti meninggalkan panggung politik dan semakin tenggelam dalam pengelolaan amal usaha dan dakwah kemasyarakatan.

Pernyataan mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik merupakan penegasan ulang mengenai status dan eksistensi Muhammadiyah yang tetap konsisten dengan kepribadian dan *Khittah* perjuangannya sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan *khittah* perjuangan Muhammadiyah dan keputusan Muktamar ke-38 di Ujung Pandang yang ditegaskan kembali dalam Muktamar ke-43 di Banda Aceh, tampaknya peran dan strategi politik yang dimainkan Muhammadiyah itu bersifat mandiri dan independen dengan ciri khasnya sendiri. Berdasarkan salah satu doktrinnya, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis dan tidak melakukan afiliasi atau berkolaborasi dengan partai politik atau kekuatan politik apapun.[27] Artinya bahwa Muhammadiyah berperan sebagai organisasi reformis keagamaan, agen perubahan sosial dan kekuatan politik. Sementara Muhammadiyah bukan organisasi atau partai politik yang bisa berafiliasi dengan partai politik manapun, walaupun Muhammadiyah tidak akan pernah mengelak dari politik.

Peran politik seperti itulah, meminjam istilahnya Amien Rais, yang dimaksud dengan *high politics*, yaitu sebagai politik luhur, adiluhung, dan berdimensi moral etis. Peran politik Muhammadiyah yang adiluhung itu tidak

---

[27] Asep Purnama Bahtiar, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2004), 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berorentasi pada kekuasaan, jabatan, atau jatah kursi di lembaga-lembaga pemerintah maupun dewan perwakilan.[28]

Namun ketika lahir dan berkembangnya PAN justru menunjukkan dinamika baru yang juga melanjutkan ketegangan kreatif lama tentang hubungan yang bersifat personal dan dan tidak langsung maupun yang bersifat netral murni dari Muhammadiyah dengan politik. Pada kasus PAN hal tersebut menjadi kontroversial karena ketua umum PAN adalah M. Amien Rais yang sebelumnya adalah ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh. Kelahiran PAN kendati tidak keluar langsung dari rahim organisasi Muhammadiyah tetapi secara moral dan kesejarahan terkait dengan ijtihad politik hasil Tanwir Muhammadiyah bulan Juli tahun 1998 di Semarang.[29]

Dari hasil sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1998 di Semarang, terdapat dua isu yang merupakan kenyataan sosiologis yang dihadapi kalangan Muhammadiyah. *Pertama*, M. Amien Rais yang pada waktu menjadi Ketua PP Muhammadiyah telah muncul sebagai tokoh reformasi dan langkah politiknya menimbulkan perubahan peta politik Orde Baru sampai akhirnya meledak menjadi gerakan reformasi. *Kedua*, sebagai tindak lanjut ingin mendorong kereta reformasi dalam memasuki era baru paska kejatuhan Orde Baru yang memerlukan pemerintahan baru yang memperoleh legitimasi

---

[28] Ibid, 23
[29] Haedar Nashir, *Dinamika Politik*……,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat. Dan sejumlah tokoh Muhammadiyah menghendaki Amien Rais untuk mendirikan partai politik baru, dengan dukungan luas itu Muhammadiyah mencerminkan tanggung jawab terhadap reformasi.

Dengan demikian dalam perkembangan berikutnya setelah melalui liku-liku berbagai proses politik, akhirnya M. Amien Rais sampai pada ketetapan untuk mendirikan partai politik baru yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SEJARAH PERGUMULAN POLITIK MUHAMMADIYAH

A. SEJARAH PERGUMULAN POLITIK MUHAMMADIYAH MASA ORDE LAMA

1. Sejarah Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan nama perserikatan keagamaan yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M dan didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan.[1] Jika di awal didirikannya pada tahun 1912, Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan, maka Muhammadiyah sebenarnya telah terlibat dalam gerakan politik sejak sebelum kemerdekaan, yaitu dimasa konfigurasi politik seputar penyusunan Piagam Jakarta.[2]

Hal ini terlihat ketika tokoh-tokoh Muhammadiyah secara langsung terlibat dalam proses penyusunan Piagam Jakarta tersebut, seperti Kahar Muzakkar yang secara langsung terlibat berdebat dengan kaum nasionalis sekuler mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang telah menjadi "mitos" hingga saat ini. Bahkan arsitek utama bangsa Indonesia merupakan warga Muhammadiyah, yang terdiri dari elite agama (ulama-ulama Muhammadiyah) yang menghendaki agar negara Indonesia didirikan berdasarkan syari'at Islam. Akibat ngototnya elite Muhammadiyah sehingga

---

[1] A.R. Fakhruddin, *Mubalig Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa; 2007), 3
[2] Fajlurrahman Jurdi, *Aib Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: JUXTAPOSE, 2007), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu lolos menjadi dasar Negara, yang belakangan kemudian dihapus pada tanggal 18 Agustus1945, sehari setelah kemerdekaan.[3]

Keinginan elite Muhammadiyah yang mau membentuk Indonesia sebagai Negara Islam bagi penulis itu merupakan konsekuensi logis, karena masyarakat Indonesia secara sosio-kultural mayoritas beragama Islam. Negara Islam sebagai konsep dengan menjadikan Islam sebagai undang-undang negara. Dengan kata lain, Islam sebagai negara adalah isi dari negara Islam dalam pemahaman konseptual. Yang intinya bahwa elite Muhammadiyah menghendaki negara yang akan di dirikan adalah negara yang melandaskan tata aturannya pada Islam.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam pergumulan politik praktis di seputar kemerdekaan, merupakan langkah yang paling berani dalam sejarah dan dinamika perkembangannya. Karena komitmennya untuk tidak terlibat di dalam ranah politik praktis merupakan sebuah langkah yang memiliki akses yang besar terhadap organisasi seperti Muhammadiyah. Dilema Muhammadiyah ketika tidak mau terlibat kedalam ranah politik praktis, adalah sangat riskan terhadap eksistensi organisasi.[4]

Kenetralan Muhammadiyah dalam politik, merupakan hal yang terpenting dalam menata dan menjaga organisasi dari berbagai kepentingan

---

[3] Ibid, 30
[4] Ibid, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak di inginkan. Karena sekali organisasi terlibat dan menjadi partai politik, pada saat yang sama kepentingan yang diperjuangkan akan mengalami perubahan paradigma.

Disatu sisi Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi yang paling banyak bersentuhan dengan politik, tetapi secara organisatoris tidak pernah memberikan ruang untuk terlibat kedalam politik praktis. Bagi Muhammadiyah, politik yang dikembangkannya adalah ranah politik yang selalu berpihak kepada nilai, terutama kaum *mustad'afin.*[5]

Perjalanan politik Muhammadiyah dalam sejarah, sudah saatnya melihat kembali ketika masa penjajahan Jepang, semenjak Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923, dan kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh "Ibrahim". Pada masa kepemimpinannya terjadi perbedaan orientasi dan persepsi mulai mewarnai kehidupan organisasi. Hal ini tercermin dari munculnya perdebatan internal dan eksternal:[6] *pertama*, benturan yang dialami dalam kepemimpinan Ibrahim terkait dengan adanya dugaan penerimaan dana haram sekaligus menajadi kaki tangan dari pemerintahan kolonial Belanda.

Tuduhan tersebut disambut Ibrahim dengan sikap yang sangat terbuka. Ibrahim akhirnya mengundang seluruh utusan dari cabang-cabang Muhammadiyah untuk memeriksa keuangan dan notulensi rapat pengurus

---

[5] Ibid, 32

[6] Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani" Independensi* Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, *Rasionalitas, Dan Pluralisme*, (Jakarta: Pusat Study, 2005), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan akhirnya terbukti bahwa dugaan tersebut tidak memiliki dasar.

Kedua, yang dipicu munculnya kebijakan pemerintah Belanda yang berupa *"Ordinansi"* Sekolah Liar atau "*Wilde Schoolen Ordonantie*". Ordonansi Sekolah Liar adalah sebuah peraturan perundangan dari pemerintah kolonial Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1932, yang intinya melarang adanya perguruan atau sekolah di Hindia Belanda, yang didirikan atau diselenggarakan oleh siapa pun yang tidak didukung dengan tenaga pengajar yang berijazah guru dari pendidikan guru resmi yang diakui oleh pemerintah Belanda.

Muhammadiyah menilai peraturan tersebut disamping memiliki motif untuk menghancurkan perjuangan bangsa Indonesia di bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus mengandung tujuan memecah belah rakyat Indonesia yang beragama Islam dengan golongan nasionalis.

Pada akhirnya, ternyata Muhammadiyah mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa kompromi. Misalnya, Muhammadiyah harus menyesuaikan kurikulum pendidikannya dengan kurikulum pemerintah, dan Muhammadiyah juga harus menyesuaikan standar pelayanan sebagaimana yang resmi berlaku.

Salah satu kecenderungan yang terjadi pada generasi kepemimpinan Muhammadiyah adalah mulai masuknya orientasi pada politik praktis. Kecenderungan ini mulai muncul sejak 1937 pada masa kepemimpinan Mas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mansur, yang menjadi tokoh puncak Muhammadiyah menjelang Perang Dunia II. Mas Mansur adalah salah seorang pemerkasa berdirinya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia)[7], sekalipun bukan sebuah federasi politik berbagai elemen umat Islam, namun bobot politiknya tidak dapat dipungkiri.

Perubahan kecenderungan orientasi Muhammadiyah ke arah politik merupakan hasil perpaduan antara dorongan internal kepemimpinan Mas Mansur dengan tuntutan eksternal, dimana kekuatan partai-partai politik sedang melemah pada saat situasi politik justru sedang meningkat. Tingginya konflik antar kekuatan politik saat itu telah menimbulkan tarikan yakni kebutuhan memperoleh dukungan dan berafiliasi dengan kelompok lain. Inilah yang mendorong Muhammadiyah terjun ke dalam aktivitas politik praktis.[8] Peristiwa ini mempunyai arti penting dalam perkembangan Muhammadiyah, karena kepemimpinan Mas Mansur telah berhasil meletakkan dasar-dasar partisipasi politik Muhammadiyah di pentas nasional.

Berbeda dengan sikap penjajah Belanda yang cenderung mencurigai aktivitas politik Islam dan lebih mencemaskan kalangan bangsawan, pemerintah Jepang justru bersikap sebaliknya. Mereka cenderung bersikap lunak terhadap kelompok Islam. Misalnya, mereka mendekati tokoh Muhammadiyah, Mas Mansur, untuk duduk bersama Ki Hajar Dewantara,

---

[7] MIAI terbentuk pada tanggal 21 September 1937 atas inisiatif Mas Mansur dari Muhammadiyah, KH. M. Dahlan dari Nahdlatul Ulama dan Wondomiseno dari Sarekat Islam. Tujuannya adalah " untuk membicarakan dan memutuskan soal-soal yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam, yang keputusannya harus dipegang dan dilakukan bersama-sama oleh segenap perhimpunan-perhimpunan yang menjadi anggotanya.

[8] Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moh. Hatta dan Soekarno sebagai pemimpin organisasi baru yang dinamakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

Memang harus diakui bahwa kepemimpinan Muhammadiyah periode Mas Mansur banyak dipengaruhi oleh aktivitas politik praktis nasional. Hal ini bisa dipahami, karena gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia memang sedang memperoleh momentum pada dasawarsa 1930-an. Mas Mansur sendiri, selain terlibat dalam MIAI juga terpilih sebagai salah satu tokoh PII (Partai Islam Indonesia). Keterlibatan Muhammadiyah dan dirinya secara langsung telah menjadikannya sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka pada masa itu.[9]

Aktivitas langsung Mas Mansur sebagai pucuk pimpinan partai tentu saja menimbulkan perdebatan di kalangan anggota Muhammadiyah. Pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan penuh Muhammadiyah dalam politik, berkeinginan agar Muhammadiyah bersikap netral terhadap semua partai. Sementara pihak yang setuju, mengembalikan kepada Mas Mansur sendiri untuk menentukan sikap pribadinya. Akhirnya perdebatan ini diselesaikan dalam Sidang Tanwir 1939 yang memutuskan untuk mengizinkan Mas Mansur melanjutkan keterlibatannya dalam partai politik. Namun, meski diizinkan untuk terus berkiprah dalam partai politik, Mas Mansur sendiri

---

[9] Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat,.....,102*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan hanya akan menjadi penasehat partai dan mundur dari kepengurusan PII (Partai Islam Indonesia).[10]

Peran politik Muhammadiyah berikutnya di lanjutkan oleh Ki Bagus Hadikusuma, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1944-1953. pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah melahirkan dokumen Muqaddimah Anggaran Dasar, sebagai basis pijakan yang kuat dalam melaksanakan amal usaha dan perjuangannya, dan juga perubahan anak kalimat "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam pembukaan UUD 45 menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".[11]

Sejak masa kepemimpinan Ki Bagus hingga periode AR. Sutan Mansur (1952-1959), Yunus Anis (1959-1968) dan Ahmad Badawi (1962-1968), Muhammadiyah memiliki keterlibatan yang sangat intens dengan dunia politik praktis, yakni keterlibatan Muhammadiyah sebagai salah satu anggota istimewa Masyumi yang didirikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta tahun 1945. posisi seperti ini dianggap paling tepat bagi Muhammadiyah, karena Masyumi dianggap sebagai saluran aspirasi politik yang tepat bagi warga Muhammadiyah, selain juga untuk mempertahankan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak perlu berubah

---

[10] Ibid,102
[11] Ibid, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi partai politik, karena semua urusan warga Muhammadiyah yang terkait dengan perjuangan di arena politik diserahkan kepada Partai Masyumi.[12]

2. Kiprah Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi

Salah satu episode paling penting dari sejarah keterlibatan Muhammadiyah dalam politik kepartaian adalah posisi Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi lahir di Yogyakartsa pada tanggal 7 November 1945 yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo, Masyumi di harapkan menjadi satu-satunya wadah bagi kepentingan politik umat Islam dengan tujuan Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama[13] serta sebagai respon umat Islam terhadap imbauan pemerintah melalui pengumuman 3 oktober 1945, yang mengajak rakyat untuk mendirikan partai. Imbauan yang ditandatangani Wakil Presiden Moh Hatta tersebut diulang lagi pada 3 November 1945. Berdirinya Partai Masyumi diputuskan dalam kongres Muslimin Indonesia di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Kongres tersebut juga mengikrarkan : *pertama*, Masyumi adalah satu-

---

[12] Ibid, 105

[13] Andi Wahyudi, *Muhammadiyah Dalam Gonjang-Ganjing Politik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya partai politik Islam di Indonesia. *Kedua*, bahwa Masyumi-lah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia.[14]

Untuk memudahkan kiprah politik Muhammadiyah dalam Masyumi, uraian mengenai dinamika hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi mengalami pasang surut sebagaimana perjalanan hidup manusia, situasi tersebut bisa dipetakan menjadi tiga tahap:

a. Hubungan Harmonis (1945-1955)

Hubungan mesra antara Muhammadiyah dengan Masyumi ditandai dengan peranan penuh Muhammadiyah dalam mendirikan partai maupun mempertahankan eksistensi partai tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proporsi orang-orang Muhammadiyah dalam kepengurusan PP. Masyumi yang cenderung mengalami kenaikan dan selalu diatas 50%.

Kedekatan hubungan antara Muhammadiyah dan Masyumi sedikit banyak disebabkan karena adanya kedekatan gagasan antara dua organisasi tersebut dalam hal memandang hubungan antara politik dan masyarakat. Tujuan kedua organisasi itu yakni tegaknya Islam dan terwujudnya masyarakat Islam. Perbedaannya terletak pada wilayah gerakan, jika Muhammadiyah bergerak

[14] Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1997), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ranah kultural maka Masyumi bergerak dalam ranah politik praktis.[15]

Hal ini terlihat ketika perhatian dan aktivitas Muhammadiyah lebih terfokus pada revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Sedangkan Masyumi dalam tujuannya, yaitu menegakkan kedaulatan RI dan agama Islam, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.[16] Atau juga bisa dikatakan, jika Masyumi berupaya untuk mencapai kekuasaan Islam, maka Muhammadiyah berupaya untuk mengisi kekuasaan itu.

Ketika pada tahun 1955, hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi semakin mesra. Lebih-lebih ketika diselenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakil dari Dewan Perwakilan dan Majelis Konstituante. Besarnya peran Muhammadiyah dalam pemenangan Pemilu tercermin dari besarnya mobilitas sumber daya manusia serta aset-aset kekayaan Muhammadiyah bagi pemenangan Masyumi. Posisi dan kedudukan Muhammadiyah dengan Masyumi memang sangat dominan. Kedudukan

---

[15] Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani*, ..., 106-107
[16] Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah*....., 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah sebagai anggota istimewa kadang-kadang membuat Muhammadiyah menjadi identik dengan Masyumi.[17]

Dari hubungan mesra antara Masyumi dengan Muhammadiyah: *pertama*, merumuskan konsep ikatan Masyumi dengan anggota-anggota istimewa. Konsep anggota istimewa di putuskan dalam Sidang Tanwir 1951. *Kedua*, langkah politik pada tahun 1955, saat pemilu di selenggarakan untuk memilih wakil-wakil dari Dewan Perwakilan dan Majelis Konstituante, serta peran Muhammadiyah dalam pesta demokrasi ini tercermin dalam mobilisasi sumber daya manusia dan seluruh kekayaannya.[18]

b. Hubungan Renggang (1956-1959)

Kerenggangan Muhammadiyah dengan Masyumi dimulai setelah Pemilu 1955, ditandai dengan kekecewaan yang muncul di kalangan Muhammadiyah, karena perolehan kursi dalam Masyumi pada Pemilu 1955 tidak seimbang. Padahal porsi Muhammadiyah dalam kepengurusan PP. Masyumi lebih dari 50%. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah keberadaan Muhammadiyah dalam Masyumi tetap dipertahankan atau keluar.[19]

Dari perdebatan itulah melalui sidang tanwir 1956 di Kaliurang, Yogyakarta, memunculkan empat corak pemikiran

---

[17] Ibid, 193
[18] Ibid, 194
[19] Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani*,....., 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: *pertama*, menghendaki agar Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik, corak pemikiran ini menggugat perolehan kursi bagi Muhammadiyah di Majelis Konstituante yang tidak seimbang. Juga posisi penting di Dewan Konstituante tidak di tangan Masyumi. *Kedua*, menghendaki pisahnya hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi, dan Muhammadiyah kembali kepada tradisi sendiri, yaitu dakwah kepada seluruh lapisan dan aliran yang ada, sedangkan untuk masalah politik diserahkan kepada masing-masing anggota. Corak pemikiran ini mengesankan gerakan kembali ke dasar awal Muhammadiyah didirikan. *Ketiga*, menghendaki hubungan Muhammadiyah dan Masyumi pisah, Muhammadiyah menjadi partai politik, menurut corak pemikiran ini, ikrar Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam Indonesia sudah tidak berlaku, karena keluarnya PSII (1947) dan NU (1952) dari Masyumi. *Keempat*, menghendaki hubungan Muhammadiyah dan Masyumi tetap berlangsung, corak pemikiran ini, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.[20]

---

[20] Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah*……, 194-198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari keempat corak itu, menekankan cita-cita Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam yang tidak memisahkan perjuangan politik yang berimplikasi pada keputusan bahwa hubungan Muhammadiyah dan Masyumi harus dipertahankan, sepanjang belum ada ketentuan yang lain, misalnya Masyumi memutuskan dihapuskannya keanggotaan istimewa.[21]

Setelah perdebatan dalam sidang tanwir 1956, maka dibentuklah tim perumus yang terdiri dari empat orang: AR. Fachrudin, Junan Nasution, Malik Ahmad dan Hamka. Dan menghasilkan keputusan bahwa Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, berjalan menurut khittahnya, sedangkan yang berkenaan dengan politik praktis disalurkan dan diatur bersama dengan Masyumi.[22]

c. Akhir Hubungan (8 September 1959)

Kebijakan PP. Muhammadiyah untuk mengakhiri hubungannya dengan partai Masyumi di mulai sesudah sidang tanwir Mei 1959 hingga betul-betul hubungan keduanya berhenti pada September tahun ini pula, atau membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Proses akhir hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi

---

[21] Ibid, 200-201
[22] Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani*,.....,111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan melalui 5 kali sidang: 2 kali sidang pleno dan 3 kali sidang harian. Sidang pleno pertama pada tanggal 25 Juni 1959 mengagendakan masalah keanggotaan istimewa Masyumi dan disepakati adanya penghapusan keanggotaan istimewa tersebut.[23]

Sidang pleno kedua, 15 Agustus 1959, agenda pembicaraan masih meneruskan agenda sebelumnya dan akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menemui PP Masyumi (Prawoto Mangkusasmito) guna mencari penjelasan bersama dan akhirnya melalui perdebatan panjang diantara anggota istimewa, PP Masyumi memutuskan jalan kompromi, yakni akan melepaskan keanggotaan istimewa para anggotanya.[24]

Keberhasilan proses pelepasan status Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi sebenarnya memiliki beberapa nilai strategis, *pertama*, mengembalikan citra Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dengan orientasi dakwah. *Kedua*, mengembalikan Muhammadiyah kepada khittahnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam ranah kultural.[25]

---

[23] Ibid, 112
[24] Ibid,113
[25] Ibid, 114-115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SEJARAH PERGUMULAN POLITIK MUHAMMMADIYAH MASA ORDE BARU

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah memang tidak pernah tampil sebagai organisasi politik. Meskipun ketika Orde Lama (sekitar tahun 1945-1959) banyak bergelut dalam urusan politik, namun sepenuhnya kerterlibatan itu tidak menjadikan Muhammadiyah haus dengan kekuasaan. Seperti ketika menjadi Anggota Istimewa Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), justru Muhammadiyah memainkan peran dalam wilayah konsep dan strategi. Muhammadiyah sama sekali tidak haus dengan kekuasaan dengan memampang keder-kadernya untuk duduk di jabatan struktural yang strategis.[26]

Dari penjelasan di atas, penulis melihat bahwa Muhammadiyah memang tidak didesain untuk menjadi partai politik, walaupun Muhammadiyah sempat bergelut dalam politik praktis, tetapi keterlibatannya tidak menjadikan Muhammadiyah haus dengan kekuasaan. Hal ini dilakukan Muhammadiyah karena keterlibatan dalam politik adalah bagian dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kemudian ketika Masyumi bubar, tepatnya ketika memasuki babak-babak awal Orde Baru, Muhammadiyah ikut membidani lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tanggal 30 Februari

---

[26] Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1968.[27]Muhammadiyah berperan aktif dalam melahirkan partai baru yang mewakili kesatuan umat muslim di Indonesia. Tetapi, Muhammadiyah, sekali lagi, tidak pernah haus kekuasaan, karena tidak ada kader Muhammadiyah yang duduk di jajaran struktural strategis, melainkan banyak kader dan tokoh Muhammadiyah yang bermain di belakang layar.[28]

Setelah Muhammadiyah kembali kepada *Khittah* tahun1971, memasuki Orde Baru, Muhammadiyah sudah tidak lagi bersinggungan dengan politik praktis. Kehadiran Muhammadiyah justru terasa lebih nyata sebagai gerakan sosial keagamaan yang berprinsip pada *amar ma'ruf nahy munkar*. Bahkan kinerja Muhammadiyah mampu menarik hati penguasa Orde Baru sehingga banyak agenda Muhammadiyah disokong oleh pemerintah. Bahkan, beberapa kader Muhammadiyah menduduki posisi struktural di pemerintahan.[29]

Belajar dari pengalaman pergulatan politik pada awal Orde Baru, akhirnya Muhammadiyah mengambil kesimpulan bahwa bersikap netral terhadap semua partai politik dan kembali kepada jalur dakwah non-politik merupakan langkah yang lebih tepat. Muhammadiyah juga memberi kebebasan kepada anggota-anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui partai politik manapun. Muhammadiyah menyadari arti penting

---

[27] Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 38

[28] Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah Kritik*.....188

[29] Ibid, 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kembali ke khittah" untuk membangun kekuatan moral dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa, melalui konsep a*mar ma'ruf nahy munkar*.[30]

Kesadaran para pimpinan Muhammadiyah dalam melihat kecenderungan kebijakan rezim Orde Baru yang tidak memberi ruang ekspresi dan partisipasi politik Islam, membuat persyarikatan Muhammadiyah melakukan terobosan yang berani melalui Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Makassar dengan menyusun konsep Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang intinya bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, serta tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun.[31]

Khittah perjuangan yang menegaskan sikap netral merupakan titik balik bagi Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya yang berbasis pada strategi kultural. Muhammadiyah sangat menyadari bahwa keterlibatan dalam politik praktis memiliki ongkos yang sangat mahal, karena Muhammadiyah terlalu di disibukkan oleh-oleh urusan politik sehingga aktivitas dakwah dan pengelolaan amal usaha menjadi terbengkalai. Muhammadiyah juga memperlihatkan jati dirinya sebagai gerakan amal yang

---

[30]Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani*……, 117
[31] Ibid, 121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdimensi sosial, seperti tampak pada fokus utama menambah sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lain.

Sistem politik yang dikembangkan rezim Orde Baru memang banyak memberi dampak yang tidak menguntungkan bagi kalangan Islam. Bagi kelompok manapun, tentu mereka memerlukan formula baru agar dapat terus eksis di tengah kekuasaan Orde Baru. Dan sikap politik yang dikembangkan oleh kalangan Islam modernis, termasuk Muhammadiyah, cenderung bersifat penyesuaian diri (akomodatif) terhadap Negara, meski tanpa kehilangan sikap kritis. Dengan demikian, dimensi politik dari dakwah Muhammadiyah di tampilkan dalam bentuk saran-saran, pendapat dan pertimbangan yang diberikan kepada para pengambil keputusan politik. Ini disampaikan Muhammadiyah melalui lobi, silaturrahmi, maupun surat resmi.[32]

Sejalan dengan pandangan bahwa politik dilaksanakan untuk kepentingan dakwah, maka politik yang dijalankan Muhammadiyah merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahy munkar*, yaitu usaha untuk mengajak manusia pada kebenaran dan meninggalkan kemungkaran. Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang antara Muhammadiyah dengan Negara dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani, dengan menciptakan relasi yang seimbang antara Negara dengan masyarakat.

---

[32] Ibid, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1973, misalnya, umat Islam menghadapi suatu masalah serius sehubungan dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan ke DPR. RUU Perkawinan ini dianggap merugikan umat Islam, karena banyak pasal dalam RUU bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, RUU Perkawinan tersebut, asasnya juga bertolak belakang dengan penyaluran aspirasi golongan-golongan (agama).[33]

Pada peristiwa lain, Muhammadiyah juga pernah mengambil resiko politik dengan menerima kebijakan penghentian subsidi dari pemerintah terhadap perguruan Muhammadiyah pada tahun 1980. hal ini bermula ketika Muhammadiyah menentang keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 5 Juli 1978 yang menetapkan bahwa selama bulan Ramadhan sekolah-sekolah tidak boleh diliburkan, kecuali beberapa hari pada awal bulan dan beberapa hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri.[34]

Berdasarkan contoh peristiwa di atas, tampaknya peran politik Muhammadiyah dapat terealisasi dalam upaya mempertahankan sikap kritis terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Berbagai sikap politik yang ditempuh Muhammadiyah di tengah sistem politik Orde Baru terhadap umat Islam memperlihatkan sikap dan perilaku politik yang mencoba mengambil jalan tengah melalui politik alokatif. Keberadaan kader-kader Muhammadiyah dalam jaring birokrasi pemerintah ternyata tidak bersifat pasif ketika

---

[33] Ibid, 127
[34] Ibid, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadapan dengan kebijakan pemerintah, karena pada kesempatan tertentu, Muhammadiyah ternyata juga berani mengambil sikap kritis dan tegas dalam menyikapi perkembangan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan misi Muhammadiyah dan kepentingan publik.[35]

Peran politik Muhammadiyah dapat terealisasi dalam upaya mempertahankan sikap kritis terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Hal ini, salah satunya, terlihat dari diterimanya beberapa usulan PP Muhammadiyah dalam UU SPN. Hal yang telah di perjuangkan dalam UU SPN mengenai mata pelajaran agama yang menjadi kurikulum baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri.

Peristiwa berikutnya adalah Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993, dengan tokoh utama Amien Rais. Amien Rais dalam Sidang tanwir yang diwarnai munculnya gagasan agar Muhammadiyah merekomendasikan sikap tegas terhadap persoalan politik, merumuskan gagasan tentang suksesi kepemimpinan nasional.

C. SEJARAH PERGUMULAN POLITIK MUHAMMADIYAH MASA REFORMASI

Hari- hari terakhir menjelang tumbangnya Soeharto sebagai presiden di bulan Mei 1998, suasana ekonomi dan politik di tanah air berselimut ketidakpastian, harga-harga kebutuhan dasar rakyat yang melonjak tinggi.

[35] Ibid, 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memicu ketidakpuasan rakyat diseluruh penjuru. Luapan kemarahan rakyat terungkap dengan demonstrasi yang secara mencolok dimotori oleh Mahasiswa diberbagai kampus-kampus besar. Kemudian diikuti pula oleh seluruh civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia. Tuntutan massa semakin meningkat dan menarik simpatik banyak kalangan, setelah negara tidak mendengarkan seruan mereka untuk segera melakukan reformasi total, malahan melalui aparat negara menerapkan tindakan beringas terhadap aksi-aksi mahasiswa. Puncak dari berbagai aksi itu tersimpul dalam satu kalimat" turunkan Soeharto".

Sikap politik Muhammadiyah, menurut Najib, wakil sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, bahwasanya Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang tetap sesuai dengan dasar Muhammadiyah itu sendiri sebagai organisasi masyarakat yang tidak akan terjun dalam politik praktis.

Dasar-dasar politik bagi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam yang selalu eksis dalam dunia politik adalah bahwa politik itu penting, tetapi tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah, jika orang Muhammadiyah ingin terjun di bidang politik maka harus buat wadah tersendiri yang berada di luar Muhammadiyah, yang tidak berhubungan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelembagaan dengan Muhammadiyah tapi keduanya harus bisa bekerjasama dan harus pula bekerjasama dengan kekuatan umat Islam lainnya.[36]

Sebagai tindak lanjut dari sikap politik Muhammadiyah, pada sidang tanwir yang diadakan di Semarang, Menurut Syafiq Mughni, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, bahwa pada sidang tanwir itulah kemudian Muhammadiyah memberikan amanat kepada pengurus pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihat politik, dalam rangka mencapai maslahat umat secara maksimal dengan berlandaskan semangat dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*. Keputusan itu merupakan respon positif Muhammadiyah terhadap kerinduan warganya untuk mempunyai partai politik baru yang bisa menampung dan menyalurkan aspirasi warganya. Amien Rais sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah dan juga sebagai tokoh Reformasi pada saat itu, kemudian melaksanakan amanat tersebut dengan mendirikan partai politik baru.[37]

Dari situlah dapat diketahui bahwa Muhammadiyah akan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai organisasi dakwah, sehingga tidak akan pernah berubah menjadi partai politik. Akan tetapi Muhammadiyah memberi keleluasaan kepada segenap warganya untuk membentuk partai politik baru

---

[36] Najib, *Wawancara*, Surabaya, 10 Februari 2005. Dalam skripsi Hafifah (Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya), *Muhammadiyah dan NU di Era Reformasi (Sikap Politik Dalam Menghadapi Pemilu 1998-1999, 2005)*, 24

[37] Syafiq Mughni, Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2005, Dalam skripsi Hafifah (Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya), *Muhammadiyah dan NU di Era Reformasi*……, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dengan kata lain orang Muhammadiyah tidak dilarang membikin partai politik.

Namun ketika robohnya tembok kekuasaan rezim orde baru menyebabkan berkembangnya kehidupan multipartai. Bisa dikatakan hampir semua kelompok politik yang semasa orde baru dimatisurikan, bangkit kembali membentuk partai politik baru maupun lama. Kelahiran kembali partai-partai baru dan bangkitnya kembali partai-partai lama merupakan cerminan dari keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk (*plural society*)[38]

Ketika di awal reformasi 1998, Muhammadiyah kembali terseret ke dalam politik praktis bahkan berpesta ria dengan memberikan dukungan penuh kepada Amien Rais sebagai kader terbaik dari Muhammadiyah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa wajah dan penampilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pemimpinnya walaupun bentuk kepemimpinan itu bersifat kolektif sebagaimana Muhammadiyah. Sejak M. Amien Rais, yang ahli politik Timur Tengah itu, masuk dalam jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, warna politiknya mulai kelihatan. Lebih-lebih setelah melemparkan wacana suksesi kepemimpinan nasional dalam sidang tanwir di Malang tahun 1993. kemudian dilanjutkan keterlibatan ketua umum PP.

---

[38] A. M. Fatwa, *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa*, (Jakarta: INTRANS, 2003), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah hasil muktamar ke-43 di Banda Aceh tersebut dalam membawa gerbong Reformasi menuju lengsernya Soeharto.[39]

Ambiguitas Muhammadiyah menghadapi realitas kebangsaan pada satu sisi, menuntut Muhammadiyah terlibat aktif dalam pencaturan politik nasional. Di sisi lain mempertahankan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan mulai nampak. Untuk memperjelas sikap politik Muhammadiyah, maka sidang tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan tanggal 5 Juli 1998 yang mana keputusannya mengikhlaskan Amien Rais terjun dalam Politik praktis tidak itu saja, pemuda Muhammadiyah juga mengikhlaskan kalau bangsa Indonesia menghendaki Amien Rais memegang jabatan di pemerintahan.[40]

Dengan rekomendasi itulah kemudian Amien Rais mempunyai keinginan untuk mengkondisikan warga Muhammadiyah menerima kehadiran partai politik baru dalam menghadapi pemilu 1999, yang pada masa Reformasi tersebut, telah diberlakukan multi partai. Partai yang akan didirikan bersifat terbuka, bercirikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan tujuan pokok untuk mendorong proses Reformasi.

---

[39] Ibid, 149

[40] Sudarsono Shabron, *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional,* (Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press,2003),145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS ARTIKULASI POLITIK MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI

A. RELASI MUHAMMADIYAH DENGAN PARTAI POLITIK

Hubungan Muhammadiyah dengan partai politik, nampaknya pengulangan Muhammadiyah tetap berkomitmen kepada hasil keputusan muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang untuk bersikap netral, tidak berpihak kepada parpol manapun. Artinya bahwa secara kelembagaan Muhammadiyah tidak lagi punya "tangan politik" berupa parpol yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan Muhammadiyah. Para anggota Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk aktif di parpol yang sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam hubungan Muhammadiyah dengan parpol, setelah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 23 Agustus 1998, Muhammadiyah kelihatannya terjebak dalam hubungan yang dilematis. Di satu sisi, Muhammadiyah menyatakan bahwa secara legal organisatoris tidak ada hubungan sama sekali antara Muhammadiyah dengan PAN, namun disisi lain, terkesan ada hubungan kental yang bersifat emosional-psikologis. Ini dilihat dari banyaknya pengurus Muhammadiyah di daerah yang terjun dalam PAN mengikuti jejak Amien Rais yang memimpin sebagai Ketua Umum PAN. Apalagi kelahiran PAN jaraknya tidak terlalu jauh dengan diselenggarakannya Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang pada 7 Juli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1998, di mana salah satu keputusannya adalah mengamanatkan PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik demi kepentingan umat dan bangsa (membentuk partai baru yang bersifat terbuka).[1]

Dalam bahasa Hartono Mardjono, hubungan Muhamadiyah dengan PAN disebutnya sebagai hubungan yang fanatik.[2] Hal ini lantaran adanya perangkapan jabatan antara pengurus Muhammadiyah dengan pengurus PAN baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta dipakainya sarana dan prasarana Muhammadiyah untuk kepentingan PAN.[3] Jadi melihat data empiris keterlibatan SDM, sarana dan elit serta massa Muhammadiyah dengan PAN, sulit sekali orang menghilangkan kesan PAN bukan sebagai "partai Muhammadiyah".

Ada beberapa faktor yang menjadikan momen tersebut cukup signifikan untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan. *Pertama*, soal keterkaitan secara kultural antara PAN dengan Muhammadiyah. Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, orientasi politik Muhammadiyah berseberangan haluan dengan periode-periode kepemimpinan sebelumnya. Jika periode sebelumnya Muhammadiyah lebih kuat berpegang pada Khittah tahun 1971 yang menjaga jarak dengan kekuasaan dan partai politik manapun, maka di periode-periode pasca tumbangnya rezim Orde Baru Mulai kembali ke dalam politik. Dan tentunya yang dimaksud dengan politik adalah soal

---

[1] Suwarno, *Muhammadiah sebagai Oposisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 73
[2] Ibid. 74
[3] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan meraih dukungan. Politik semacam itu lebih dikenal dengan *low politic*, demikian meminjam istilahnya Amien Rais.[4]

Kedua, pada tahun 2004 bangsa Indonesia menggelar hajatan besar melalui pesta demokrasi melalui Pemilu secara langsung. Dan sebagai bagian dari elemen bangsa, Muhammadiyah juga termasuk PAN, jelas terlibat dalam proses Pemilu dan disinilah terjadi perdebatan.

Sama halnya dengan Muhammadiyah, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2004, Muhammadiyah telah mengeluarkan kebijakan politiknya. Melalui Rapat Pleno diperluas tanggal 10 Februari tahun 2004 Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh warganya dalam menyikapi Pemilu. Salah satu butir keputusannya mempertegas dukungan terhadap M. Amien Rais, sebagai keder terbaik Muhammadiyah untuk menuju ke kursi kepresidenan melalui Pilpres. Dengan kebijakan resmi PP. Muhammadiyah itu, secara otomatis seluruh elemen Muhammadiyah mulai dari bawah sampai pimpinan pusat jelas berjuang mendukung kader terbaiknya.

Melihat implikasi dari dua organisasi berbeda haluan diatas sama-sama kalah dalam pemilu 2004 kemarin. Dan uniknya lagi, keduanya sama-sama menjagokan satu figur. PAN menjagokan Amien Rais sebagai capres karena ketokohannya yang telah membidani reformasi sehingga di harapkan

---

[4] Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah: Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memimpin bangsa ini ke depan. Sementara Muhammadiyah mendukung Amien Rais karena ia sendiri adalah kader terbaik dan sekaligus tokoh yang menjadi lokomotif reformasi. Jika dicermati baik-baik, maka kedua organisasi berbeda haluan itu hampir sama dari segi visi politiknya.

Dalam pandangan penulis, kepemimpinan Muhammadiyah paska Ahmad Azhar Basyir memang sangat berbeda. Visi politik Muhammadiyah amat kentara ketika Amien Rais menjabat sebagai "orang nomor satu" di persyarikatan itu. Di mulai dengan sepak terjangnya yang kritis dan vokal dalam berbagai forum mengkritik kebijakan Orde Baru. Sampai pada puncaknya ketika rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998. yang kemudian Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Sampai pada pemilu 2004 ketika dirinya mencalonkan diri sebagai presiden RI.

Sosok Amien Rais memang sangat fenomenal dalam sejarah Muhammadiyah. Dari tokoh ini, Muhammadiyah dengan mudahnya di arahkan ke dalam konteks politik praktis. Bukan hanya Muhammadiyah, bahkan bangsa Indonesia yang tadinya berada dalam cengkeraman Orde Baru pun berhasil di ubah secara drastis menjadi lebih demokratis. Penulis, di satu sisi cukup salut kepadanya, namun di sisi lain, penulis amat berharap agar syahwat politiknya, demikian meminjam istilah Syafi'i Ma'arif, jangan sampai mempengaruhi keutuhan dan eksistensi Persyarikatan Muhammadiyah yang yang telah lama terbina, karena politik praktis itu hanya akan mengkerdilkan visi perjuangan Muhammadiyah ke depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relasi Muhammadiyah dengan PAN juga banyak diperbincangkan karena PAN itu identik dengan Muhammadiyah, sebagaimana yang dilontarkan oleh Lastri Ahmadi (utusan dari Universitas Muhammmadiyah Semarang) menurutnya, meski konsep Muhammadiyah tidak mendukung partai tertentu tetapi kenyataannya bahwa ternyata Muhammadiyah itu berpolitik dengan mendukung partai tertentu, yaitu PAN. Senada juga dengan apa yang dipaparkan oleh Lastari Rizal yang mengatakan bahwa di masyarakat ada anggapan bahwa PAN itu identik dengan Muhammadiyah.[5]

Jadi partisipasi politik warga Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Amien Rais, terutama setelah mendirikan PAN, sebagian beralih ke PAN, dan hanya sebagian berada di partai lain seperti PPP, Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKS. Mengingat kenyataan ini, tidak berlebihan bila PAN disebut sebagai "eksperimen politik" Muhammadiyah, sedangkan selama kepemimpinan AR Fachruddin dan Ahmad Azhar Basyir, partisipasi politik warga Muhammadiyah terbatas pada tiga partai yang ada, yaitu sebagaian besar ada di PPP, sebagian lain di Golkar dan PDI.[6]

Pada masa demokrasi telah ada kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bebas menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Muhammadiyah dalam menegakkan demokrasi tidak setengah-setengah, berdasarkan amanat muktamar dan tanwir,

---

[5] Maryadi, Abdullah Aly, *Muhammadiyah Dalam Kritik*, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2001). 78-79

[6] Suwarno, *Muhammadiyah sebagai oposisi*....., 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah telah memberikan kepada warganya yang ahli dalam bidang politik untuk mendirikan partai politik atau bergabung dengan politik tertentu. Orang-orang Muhammadiyah di era reformasi ada yang mendirikan partai politik sendiri dan ada juga tetap bergabung dengan partai Golkar, PPP, PKS, PBB, PDIP dan di PKB.[7]

Untuk menghilangkan hubungan dilematis antara Muhammadiyah dengan PAN dapat di tempuh dua cara sebagai berikut: *Pertama*, Muhammadiyah menjalankan disiplin organisasi secara tegas terutama bagi pengurus Muhammadiyah yang merangkap jabatan di PAN untuk melepaskan salah satunya dengan memilih tetap di Muhammadiyah atau di PAN. *Kedua*, sebagaimana usul Rusydi HAMKA yaitu bahwa PAN diperbaiki saja dengan asas Islam dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari (amal usaha) Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah memiliki bagian (amal usaha) di bidang politik.[8] Dengan demikian sangat *urgen* bagi Muhammadiyah untuk segera melakukan reorentasi politik apakah tetap menggunakan paradigma sebagai gerakan kultural, atau berubah sebagai gerakan struktural, atau pula sebagai gerakan terpadu kultural-struktural.

Dari lontaran itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa di tingkat bawah PAN itu adalah partainya orang-orang Muhammadiyah. Tetapi yang

---

[7] Shabron, Sudarsono, *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional,* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. 2003). 169

[8] Ibid, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenting adalah bahwa Muhammadiyah itu perlu memfasilitasi wadah politik bagi warganya. PAN boleh jadi merupakan wadah politik bagi warga Muhammadiyah karena PAN lahir dari hasil Muktamar Muhammadiyah maka secara otomatis warga Muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik tersebut.

Pada mulanya warga Muhammadiyah sangat berharap PAN bisa menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan politik Muhammadiyah, namun kemudian timbul kekecewaan mendalam, maka sebagai perwujudan kekecewaan tersebut, pada Pemilu 2004 sebagian warga Muhammadiyah yang sebelumnya mendukung PAN mengalihkan dukungannya ke PKS. Sekarang, terlebih selepas munculnya "ketegangan" antara warga Muhammadiyah dengan PKS sebagaimana diungkap beberapa kali oleh Suara Muhammadiyah, timbul juga rasa kecewa warga Muhammadiyah terhadap PKS. Bahkan kekecewaa yang timbul begitu mendalam.

Sebagai dialektika, kehadiran partai politik baru seperti Partai Matahari Bangsa (PMB) adalah hal yang lazim. Apalagi dalam konteks demokrasi. Sebab bisa jadi kehadiran partai politik baru merupakan antitesis atau bahkan sintesis atas partai-partai politik yang ada yang dinilai tidak atau belum mampu menjalankan fungsi-fungsi politiknya dengan baik.

Maka Partai Matahari Bangsa (PMB) sebenarnya bisa menjadi semacam sintesis politik bagi warga Muhammadiyah. Awalnya warga Muhammadiyah berharap sekali PAN bisa menjadi menyalur aspirasi politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Muhammadiyah, namun pada akhirnya PAN tampil mengecewakan. Anggaplah hal ini sebagai tesis. Akibat kekecewaan tersebut, sebagian warga Muhammadiyah menjatuhkan pilihan kepada PKS. Namun lagi-lagi warga Muhammadiyah juga mengalami kekecewaan. Anggaplah ini sebagai antitesis.

Dengan kenyataan ini, PMB rasanya tepat dijadikan sebagai sintesis bagi warga Muhammadiyah. Hal ini setidaknya karena beberapa alasan. *Pertama*, PAN memang kelahirannya dibidani oleh warga Muhammadiyah, bahkan nahkoda yang pertama dipegang oleh Amien Rais, namun disayangkan kelamin asas partai ini tidak jelas. Sehingga rasanya sulit diharapkan untuk bisa memperjuangkan kepentingan dakwah Muhammadiyah. *Kedua*, PKS kelahirannya dibidani oleh komunitas kampus yang didalamnya juga terdapat warga Muhammadiyah dan berasaskan Islam. Namun selain memposisikan diri sebagai partai politik, PKS juga memposisikan sebagai organisasi dakwah, sehingga realitas di lapangan cenderung bertabrakan dengan Muhammadiyah. *Ketiga*, sementara PMB selain berasaskan Islam, juga didirikan oleh eksponen AMM yang irisan kekaderannya sangat jelas, karena mereka yang tergabung di PMB mayoritas adalah elit dan mantan elit ortom di lingkungan Muhammadiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. MUHAMMADIYAH DAN PEMILIHAN UMUM 2004

1. Fatwa Dukungan Politik Terhadap Calon Presiden Pada Pemilu 2004

Pemilihan umum 2004 adalah cerminan dari proses demokrasi yang paling bersih dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini nyata karena warga masyarakat dilibatkan secara aktif dan langsung dalam prosesi besar pesta demokrasi tersebut.

Pada pemilihan Presiden misalnya, warga masyarakat menjadi hakim pemutus pilihan yang didasarkan kepada keputusan serta pertimbangan yang cukup sederhana. Rakyat mengenal betul secara obyektif siapa calon pemimpin yang pantas untuk dipilih sebagai *top leader* Indonesia. Bukan hanya warga masyarakat juga yang turut bermain secara aktif disini, Ormas Kepemudaan, LSM, Paguyuban Lintas Sektor (buruh, tani, nelayan, tukang becak, PKL) sampai organisasi massa sosial keagamaan seperti Muhammadiyah pun turut andil juga.

Fatwa politik Muhammadiyah pada Pilpres 2004 penting untuk dikaji kembali, karena hal tersebut sampai sekarang masih banyak mengundang kontroversi, baik kalangan intern persyarikatan maupun di luar kelompok keagamaan tersebut. Sepanjang sejarah yang satu abad, Muhammadiyah pertamakalinya mengeluarkan fatwa politik "sakti" untuk mendukung calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden 2004 yakni Amien Rais bagi warganya, tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang lebih matang.[9]

Keputusan tersebut antiklimaks. Keputusan tersebut menghentikan puasa politik Muhammadiyah selama ini, sekaligus memberi jawaban pada pertanyaan yang terpendam bahwa Muhammadiyah bukan hanya lembaga yang konsen pada amal usaha sosial keagamaan dan pendidikan, namun Muhammadiyah juga menempatkan garis dakwah pada politik praktis yang berorentasi kepada *amar ma'ruf nahi munkar* dan di populerkan dengan istilah *high politics* oleh Amien Rais.

Fatwa politik Muhammadiyah bukanlah sebuah dosa dari perbuatan yang dilakukan. Sah-sah saja dalam demokrasi sikap dan keputusan seperti itu dilahirkan, tetapi seharusnya kebijakan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih matang serta dilahirkan dari pengalaman politik masa lalu. Hal ini mengingat Muhammadiyah bukanlah sebuah lembaga yang berpengalaman dalam politik, dalam sejarah politik tanah air, Muhammadiyah hanya sekali terlibat secara langsung dengan dunia politik praktis.

Fatwa politik Muhammadiyah juga semakin menandakan bahwa nuansa politik di tubuh Muhammadiyah semakin besar dan kuat. Sehingga wajar banyak kalangan yang menilai bahwa telah terjadi pergeseran

---

[9] Hajriyanto Y Thohari, *Politik Muhammadiyah*, dalam buku; *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004,* (Jakarta: Rineka Cipta; 2004), 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma Muhammadiyah dari gerakan dakwah yang mengembangkan model berfikir nalar kritik menjadi gerakan mobilisasi politik.[10]

Dukungan pencalonan presiden terhadap Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tokoh reformasi adalah eksprimen bagi Muhammadiyah. Idealitas Muhammadiyah sebagai organisasi termodern dan pilar bangsa untuk memajukan segenap kehidupan masyarakat lebih mandiri dan maju memang tidak bisa dilupakan.

Alasan objektif yang melatarbelakangi fatwa politik tersebut memang sangat layak dan memang seharusnya seperti itu, ini melihat kondisi sosio kultural dan realitas politik yang carut marut di Indonesia dengan kondisi seperti ini dibutuhkan seorang figur pemimpin yang bisa membawa perubahan yang lebih maju. Sebagaimana dalam surat keputusan hasil sidang pleno dijelaskan secara gamblang bahwa mengingat kondisi sosio kultural dan realitas politik yang carut marut, dibutuhkan seorang figur pemimpin yang cerdas, cakap, bersih jujur dan amanah guna membawa bangsa ini terlepas dari krisis dan merampungkan agenda besar reformasi. Dalam surat keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2004 di Makassar tertulis sebagai berikut:[11]

1. Mendukung sepenuhnya langkah Prof. Dr. H. M. Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyalamatan bangsa dalam pemilihan Presiden pada Pemilu 2004

---

[10] Sudar Siandes, *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004,* (Jakarta: Rineka Cipta: 2004). 3

[11] Ibid, 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Presiden Indonesia yang diharapkan terpilih dalam Pemiiu 2004 untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyalamatan bangsa adalah tokoh yang reformis, bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memiliki visi kebangsaan yang luas, tegas dan berwibawa dalam membawa bangsa ke tengah pergaulan internasional, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memajukan kehidupan bangsa menuju kemasa depan yang lebih baik.
3. Meminta kepada warga Muhammadiyah dan mengajak kepada masyarakat untuk mendukung terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mengemban amanat reformasi serta penyalamatan bangsa.

Dukungan politik yang diberikan pada Amien Rais sang calon presiden bagi Muhammadiyah, penulis sendiri beranggapan bahwa bukanlah bentuk dari politik praktis tetapi sebatas himbauan moral-etis politik. "Riak" kontroversial akan keputusan tersebut memang menjadi referensi berharga bagi Muhammadiyah ke depan. Karena secara sadar, setelah keputusan tersebut, tersosialisasikan ternyata tidak terbukti ampuh. Calon yang dijagokan hanya mampu bertahan pada putaran awal saja. Terlepas dari varian penyebab tidak optimalnya keputusan tersebut.

2. Posisi Fatwa Politik Muhammadiyah Pada Pilpres 2004

Ijtihad politik yang dilakukan Muhammadiyah untuk mendukung sepenuhnya langkah-langkah kader terbaiknya pada Pilpres 2004 punya posisi yang tegas dan mengikat secara organisatoris. Keputusan tersebut sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting bagi Muhammadiyah. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang tepat karena pelahiran keputusan itu pada momentum yang penting.[12]

Fatwa politik ini lahir dari proses yang cukup panjang dan berkelanjutan, melihat realitas politik yang berjuang pada soal kekuasaan saja. Kiranya perlu bagi Muhammadiyah untuk mengartikulasikan dakwah politik pada bentuk yang praktis.

Diawali dengan kiprahnya melahirkan PAN, pendistribusian kader-kader terbaiknya dalam pos politik, dan terakhir secara mengagetkan melahirkan keputusan melalui Rapat Pleno yang diperluas di Yogyakarta untuk mensukseskan Amien Rais sebagai calon presiden.

Secara makro, fatwa politik Muhammadiyah bernilai untuk mewujudkan demokrasi dan menuntaskan visi besar reformasi yang salah satu pilarnya memilih pemimpin reformis-visioner.

Secara mikro, fatwa tersebut sebagai bentuk adanya pergeseran paradigma dakwah politik dari moral–etis menuju praktis.

Keputusan Muhammadiyah dalam Pilpres 2004 adalah lanjutan dari hasil keputusan Sidang Tanwir Denpasar 2002, dan Sidang Tanwir Makassar 2003. keputusan tersebut sangat mengikat yang sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah secara nasional.

---

[12] Haedar Nashir, *Muhammadiyah Partisan?*, dalam buku; *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004,* (Jakarta: Rineka Cipta; 2004), 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rapat Pleno PP. Muhammadiyah dengan PW se-Indonesia, dengan hasil keputusan yang diperluas hanya mengambil posisi peran pendukung. Bukan berpolitik praktis tetapi hanya mendekati wilayah politik karena terkait dengan pemilihan presiden. Berangkat dari misi kelanjutan reformasi, penyalamatan bangsa, dan mencegah darurat nasional. Massa Muhammadiyah hanya mengambil posisi pendukung melalui ijtihad politik.[13]

Ambiguitas posisi mendukung Muhammadiyah memang tidak bisa dipungkiri. Sebagai Ormas dengan keanggotaan 30 puluh juta lebih (berdasarkan jumlah keanggotaannya) dengan posisi mendukung melalui hasil sidang, berarti Muhammadiyah sudah berperan sebagai partai politik.

Tetapi hal yang terpenting sebagai benang merah dari fatwa politik Muhammadiyah adalah ijtihad sebagai pembelajaran politik awal dari orientasi dakwah politiknya.

Fatwa tersebut menurut Syafi'i Ma'arif sebagai bentuk respon Muhammadiyah akan realitas politik kebangsaan, disamping itu fatwa ini lahir dari akumulasi aspirasi warga Muhammadiyah dari tingkat bawah (pimpinan ranting) sampai PP, sehingga sangatlah sahaja kiranya Muhammadiyah melahirkan keputusan itu.[14]

---

[13] Ibid, 21

[14] Sudar Siandes. *Muhammadiyah: Dari Nalar Kritik Ke Mobilisasi Politik*. dalam buku. *Muhammadiyah Eksperimen Politik* Sudar Siandes, *Muhammadiyah* ……, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rekomendasi Politik Dalam Pemilihan Presiden 2004.

Muhammadiyah Resmi menjagokan "Amien Rais", demikianlah judul *Head Line* Harian Republika, 11 Pebruari 2004, meski bunyi keputusan itu sidang Pleno PP. Muhammadiyah (9-10 Pebruari 2004) tentang pemilihan presiden 2004 tidak persis seperti itu, tetapi mungkin seperti itulah persepsi publik. Apalagi warga Muhammadiyah atas keputusan tersebut. Sebagaimana bunyi keputusan itu sebagai berikut;

> "Mendukung sepenuhnya langkah Prof. Dr. H. M. Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyalamatan bangsa dalam pemilihan Presiden pada Pemilu 2004".

Meski bukan merupakan fatwa politik, keputusan tersebut memberikan isyarat yang sangat jelas dan terang benderang tidak ada penafsiran lain kecuali bahwa organisasi keagamaan yang lahir 1912 ini secara formal dan organisasional mendukung Amien Rais dalam Pemilihan Presiden 2004.

Tentu secara substansial tidak ada yang aneh dan mengejutkan dengan keputusan semacam itu, setiap warga Muhammadiyah tentu menginginkan kader terbaiknya menjadi Presiden dari sebuah Negara demokrasi.

Penulis merasa bahwa setiap anggota Ormas lain juga menginginkan hal yang sama sebab, disana ada dimensi kebanggaan, disamping itu juga harapan-harapan lainnya karena faktanya kursi kepresidenan itu memiliki aura-aura yang menggiurkan, apalagi kalau kadernya tersebut dirasa memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapabilitas, kreadibilitas, dan akseptabilitas yang cukup meyakinkan untuk menduduki jabatan itu.

Persoalannya mungkin baru muncul ketika jika dikaitkan dengan khittah Muhammadiyah sendiri, dan kalau ditinjau dari perspektif waktu, taktik dan strategi, sebagaimana kita ketahui bersama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan Sejak semula organisasi yang merupakan warisan keagamaan ini tidak di desain untuk berpolitik.

Ini semua penulis rasa berkat jasa Mas Mansur, tokoh yang dapat disebut sebagai ideologi politik Muhammadiyah yang pertama ini telah meletakkan dasar-dasar politik Muhammadiyah yang sangat menumental dalam sidang Tanwir 1939. Demikianlah rumusannya,[15] bagi Muhammadiyah (1) politik itu penting, tetapi (2) tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah jika orang Muhammadiyah ingin berjuang di bidang itu, maka (3) ia harus di buatkan wadah tersendiri (4) ia berada diluar Muhammadiyah yang (5) wadah itu tidak berhubungan secara kelembagaan dengan Muhammadiyah, tetapi, (6) keduanya harus bisa bekerja sama dan (7) wadah itu harus pula bekerja sama dengan kekuatan ummat Islam lainnya.

---

[15] Hajriyanto Y. Thohari, *Muhammadiyah dan Pergulakan Politik Iskam Modernis*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dab Perdaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan-keputusan Muktamar dan Sidang Tanwir selama ini selalu paralel dan merujuk pada rumusan ini. Bahkan, Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Denpasar, pun mengulang subtansi rumusan Mas Mansur ini, rumusan khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan eksplisit dan terang benderang menyatakan bahwa: Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi politik apapun. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada seluruh warganya untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi Muhammadiyah, dan demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Jadi posisi Muhammadiyah pada pemilu 2004 sangat jelas, namun dalam hal Pemilu Presiden, Muhammadiyah melalui sidang Tanwir di Makassar, memutuskan rekomendasi yang sedikit mengalami kelaziman yaitu dengan menempatkan garis dakwah pada politik praktis, ini terlihat jelas pada sikap politiknya pada Pemilihan Presiden 2004 dengan pendukungan pada Amien Rais sebagai calon Presiden pada Pemilu 2004 dalam rangka kelanjutan reformasi dan penyalamatan bangsa, maka Tanwir mengamanatkan kepada PP. Muhammadiyah untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, dengan mempertimbangkan secara cermat dinamika politik nasional dengan tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan kepentingan bangsa, umat Islam, dan persyarikatan sesuai dengan *khittah* perjuangan Muhammadiyah.

C. IMPLIKASI DARI ARTIKULASI POLITIK MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI

1. Implikasi Internal Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi massa yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Adapun dalam rangka merealisasikan tujuan ini, Muhammadiyah mempunyai kantong-kantong massa yang terorganisir dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas. Hal seperti ini kemudian menjadi struktur penggerak dalam pola dakwah Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwahnya seringkali ambigu, ini terlihat dari sikap politiknya yang diperlihatkan pada Pilpres 2004 yang lalu. Muhammadiyah secara organisatoris menetapkan tidak berpolitik, tetapi pada realitasnya melakukan dukungan terhadap salah satu calon Presiden. Ini salah satu sikap ambigu yang ditunjukkan Muhammadiyah. Ini sangat mempengaruhi *image* yang ada di masyarakat Muhammadiyah yang dulu tidak berpolitik praktis sekarang *image* itu terpatahkan dengan adanya sidang tanwir yang menetapkan dukungannya terhadap Amien Rais sebagai salah satu calon Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah adalah gerakan sosial-keagamaan yang memiliki serbawajah,[16] baik pada sifat gerakan, dataran kegiatan, maupun tataran aktualisasi dari pada aspek kehidupan masyarakat. Muhammadiyah sendiri mengukuhkan tridimensi gerakannya, yaitu keislaman, dakwah, dan pembaharuan (*tajdid*), tetapi juga melaksanakan kegiatan dalam hampir semua aspek kebudayaan, seperti sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tabligh, dan politik. Pada aspek tertentu kegiatan tersebut dilangsungkan pada tataran berbeda, seperti dalam bidang politik walaupun hanya bersifat teoritis diselenggarakan dalam tingkat adiluhung atau *high politics*.

Memang, soal politik dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah selalu menjadi perdebatan yang paling menarik. Buktinya dalam sidang tanwir Makassar kemarin hal yang paling ditunggu-tunggu dan paling banyak mendapat apresiasi dari peserta adalah menganai 'penyebutan nama'. Dan hasilnya Muhammadiyah akan merekomendasikan kader terbaiknya untuk didorong menjadi calon presiden pada pemilihan umum tahun 2004 nanti. Rekomendasi ini menimbulkan kontroversi dikalangan Muhammadyah sendiri atau pula masyarakat luas. Sementara kalangan Muhammadiyah yang lain menuduh Muhammadiyah telah memasuki wilayah terlarang, yakni politik praktis yang sejak kelahirannya tidak untuk dimasuki. Adapun yang mengatakan bahwa hal tersebut belum dalam kategori politik praktis

---

[16] Asep Purnama Bahtiar, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2004), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan sebagai responsibilitas Muhammadiyah terhadap realitas sosialnya. Sehingga sudah pada tempatnya Muhammadiyah peduli terhadap masa depan kepemimpinan bangsa dan sebagai tanggung jawab sosial Muhammadiyah merekomendasikan 'kader terbaiknya' sebagai solusi stagnasi kepemimpinan nasional.

Hal ini penting dilakukan oleh Muhammadiyah, mengingat peta politik Indonesia yang sangat rumit. Karena pemilu 2004 adalah pemilu dalam masa transisi sehingga kalau bukan sekarang Muhammadiyah mengambil peran, maka kapan lagi. Penulis khawatir jangan sampai pemilu 2004 hanya merupakan ajang mendaur ulang kekuasaan, dan hal ini sangat mungkin akan terjadi.

Muhammadiyah, sejak kelahirannya sudah menyatakan diri sebagai gerakan *"amar ma'ruf nahi mungkar"* alias gerakan pembaharuan (*tajdid*), walaupun dalam perjalanannya tidak bisa bebas dan tidak pernah bebas dari pergumulan politik. Tetapi yang menarik di Muhammadiyah adalah bahwa setiap anggotanya diberikan kebebasan untuk memilih partai politik sesuai dengan keputusannya sendiri. Di masa orde lama misalnya, kita menyaksikan anggota Muhammadiyah banyak yang menjadi anggota Masyumi. Begitu juga dengan Orde Baru, dan Reformasi polarisasi anggota Muhammadiyah semakin menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat demokratis dalam memberikan pilihan kepada setiap anggotanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu ditegaskan bahwa sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai - nilai demokrasi, Muhammadiyah perlu mengukuhkan diri menjadi gerakan sosial yang tidak hanya peduli dengan keagamaan tetapi juga peduli dengan realitas sosial yang terjadi. Implikasi dari itu semua adalah Muhammadiyah harus sensitif dan perlu merespon berbagai isu-isu di Indonesia. Sehingga Muhammadiyah dalam konteks ini perlu memiliki kemandirian politik. Minimal para pemimpin terasnya mandiri, berprinsip dan memiliki wawasan keumatan yang jelas. Artinya organisasi Muhammadiyah lahir adalah demi kepentingan umat, dan bukan pengabdian kepada para pemimpinnya. Atau para elite Muhammadiyah harus tampil dalam pengabdian masyarakat tanpa beban politik dan interes pribadi. Disamping itu kader-kader persyarikatan harus tidak tergiur dengan permainan politik resmi yang bisa mengoda untuk menaiki panggung umat, karena itu Muhammadiyah mesti pandai dalam menentukan pilihan-pilihan. Sekali lagi gerakan kultural merupakan langkah yang paling tepat dan menjadi agenda politik Muhammadiyah, sehingga bayangan *civil society* yang besar dan kuat akan terbentuk.

2. Implikasi Eksternal Organisasi Muhammadiyah

Implimentasi dari artikulasi politik Muhammadiyah dan dinamika perilaku elit organisasi ini pada era reformasi belakangan, merupakan dilema bagi Muhammadiyah secara kelembagaan. Dalam menyikapi hal tersebut Muhammadiyah mempunyai respon yang berbeda pada tingkat personal (baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elit atau warga), karena keragaman pandangan dan sikap dalam menghadapi fenomena multi partai tersebut. Fenomena kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN), elite dan warga Muhammadiyah di seluruh tingkatan organisasi mendukung PAN, bahkan terlibat secara aktif dalam kepengurusan.[17] Akan semakin mempertegas, bahwa gerakan ini lebih tergantung pada dinamika kekuasaan sebagai produk dari dinamika sosial kemasyarakatan dan kurang menyentuh dinamika kehidupan masyarakat bawah, atau sebagai ikrar dari organisasi ini sebagai gerakan kultural.

Adanya respon yang beragam dari kalangan Muhammadiyah terhadap Islam politik baik institusi politik yang merupakan hasil ijtihad dari ketua PP Muhammadiyah Amien Rais maupun institusi politik yang secara tegas mencantumkan simbol-simbol Islam seperti penyebutan asas dan akidah Islam dalam asas partai politik Islam. Fenomena ini justru membuat Muhammadiyah berada dalam sikap dan respon politik Muhammadiyah yang tidak mampu dijelaskan ke dalam salah satu institusi politik tertentu, sekaligus hal ini menyulitkan Muhammadiyah dalam memainkan peran-peran yang signifikan di arena politik.

Polarisasi respon elite terhadap Islam politik termasuk keragaman penafsiran atas hasil ijtihad politik ketua PP Muhammadiyah Amien Rais dalam mendirikan PAN yang disebutnya sebagai partai masa depan yang mengakomodasi segala unsur termasuk agama, namun melihat hasil Pemilu

[17] Syarifuddin Jurdi, *Negara Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1999 dan Pemilu 2004 tidak memberikan suara signifikan bagi PAN. Ini berarti PAN bukan merupakan pilihan yang utama bagi warga Muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi politik dan sekaligus merupakan jawaban atas kegagalan ijtihad politik Amien Rais.

Dengan demikian, dari kegagalan itulah muncul suatu perubahan yang perlu dilihat dalam dimensi sosio-politik, karena terbukti secara empiris telah membawa pengaruh terhadap artikulasi politik Muhammadiyah secara keseluruhan pada era reformasi, mengingat kepemimpinan elit Muhammadiyah telah beralih generasi dari hegemoni ulama kharismatik kepada generasi intelektual yang disebut intelektual-cendekiawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, pada bab pertama hingga pada bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat simpulkan sebagai berikut yang juga merupakan jawaban atas rumusan masalah :

Pertama, sejarah pergumulan politik Muhammadiyah di tandai dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam kancah politik praktis ditunjukkan oleh berupa keterlibatan Muhammadiyah secara formal organisasi dan langsung sebagaimana yang dilakukan dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan menjadi anggota istimewa sejak tahun 1945 hingga tahun 1959. kegiatan politik serupa juga dilakukan ketika Muhammadiyah membidani Partai Muslimin Indonesia pada awal Orde Baru.

Kedua, Kemudian pada tahun 2004 adalah merupakan pesta demokrasi di Indonesia dengan Pemilu Presiden yang dipilih dan di tentukan oleh masyarakat secara langsung. Posisi Muhammadiyah pada pemilu 2004, dalam hal Pemilu Presiden, Muhammadiyah melalui sidang Tanwir di Makassar, memutuskan rekomendasi yang sedikit mengalami kelaziman yaitu dengan menempatkan garis dakwah pada politik praktis, ini terlihat jelas pada sikap politiknya pada Pemilihan Presiden 2004 dengan pendukungan pada Amien

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rais sebagai calon Presiden pada Pemilu 2004, dalam rangka kelanjutan reformasi dan penyalamatan bangsa.

B. Saran-saran

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aly, Abdullah Maryadi, *Muhammadiyah Dalam Kritik*, Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2001

Asy'ari, Al Deni dkk, *Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah* Yogyakarta; Resist Book, 2005

Azhar, Muhammad, *Posmodernisme Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: anggota IKAPI, 2007

Bahtiar, Purnama Asep, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalmalan Islam (m LPPI) UMY, 2004

Fakhruddin, A.R, Mubalig *Muhammadiyah*, Yogyakrta: Adicita Karya Nusa; 2007

Fatwa, A. M, *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa*, Jakarta: INTRANS, 2003

Hambali, Hamdan, *Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah*,Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006

Jurdi, Fajlurrahman, *Aib Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: JUXTAPOSE, 2007

Jurdi, Syarifuddin, *Negara Muhammadiyah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005

Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia,*Yogyakarta: Pilar Relegia, 2005

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughni, Syafiq, Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2005, Dalam skripsi Hafifah, *Muhammadiyah dan NU di Era Reformasi*

Mulkhan, Munir Abdul, *Menggugat Muhammadiyah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000

----------, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Najib, *Wawancara*, Surabaya, 10 Februari 2005. Dalam skripsi Hafifah, *Muhammadiyah dan NU di Era Reformasi Sikap Politik Dalam Menghadapi Pemilu 1998-1999, 2005*

Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2006

----------, *Muhammadiyah Partisan?*, dalam buku; *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004,* Jakarta: Rineka Cipta; 2004

Nakamura, et al, Mitsuo, *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, Jakarta: Buku Kompas, 2005

Rais, Amien, *High "Politics"*, dalam Koentowijoyo, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru* Bandung: Mizan, 1995,

----------, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1997

Sanit, Arbit, *Reformasi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Syaifullah, *Gerakan Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shabron, Sudarsono, *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional,* Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press,2003

Siandes, Sudar, *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

----------, *Muhammadiyah: Dari Nalar Kritik Ke Mobilisasi Politik*, dalam buku, *Muhammadiyah Eksperimen Politik Dalam Pemilu Presiden 2004*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Soedjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,*Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Suryadi, Budi, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia,*Yogyakarta: IRCiSoD, 2006

Sukma, Rizal, *Muhammadiyah dan politik, Refleksi Untuk 79 Tahun Syafi'i Ma'arif.* Dalam buku *Muhammadiyah Dan Politik Islam Inklusif*, Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2005

Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani" Independensi* Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, *Rasionalitas, Dan Pluralisme*, Jakarta: Pusat Study, 2005

Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001

Tandjung, Akbar, *Perspektif Masa Depan Indonesia*, 30 Januari 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin,* Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002

Thohari, Hajriyanto Y, *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*, Jakarta; Pusat Study Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005

Wahyudi, Andi, *Muhammadiyah Dalam Gonjang-Ganjing Politik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999

Walizer, Michael H dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Jilid 2, terj. Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991

Yazid, Yusuf, *Di Antara Sipil Dan Militer,* Pusat Kajian Sipil Dan Militer, 02 Juni 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id